

E-newsletter

NOVEMBER III 2020

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# FPKS KONSISTEN PERJUANGKAN RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL



# Adil Sejak Dari Hati dan Pikiran

Kegelisahan akan minol ini bukan hanya berbasis agama, namun juga budaya. Argumentasi yang memandang bahwa pelanggaran minol diskriminatif sesungguhnya seperti berselancar diatas ketidakadilan. Padahal secara jelas daya rusak minol sangat tinggi terhadap kesehatan dan telah menyebabkan tingginya angka kriminilitas, namun ironisnya disisi lain manfaatnya sangat kecil

Adil dalam Agama - Islam - lebih dekat dengan takwa. Takwa membuat seseorang takut untuk melakukan yang tidak benar dan tidak baik.

Adil dalam persoalan hukum adalah sebuah kepastian. Agar pada akhirnya setiap perkara menemukan kebenaran dan memberikan manfaat yang lebih besar. Atasnya para hakim dan penegak hukum dituntut adil.

Keadilan harus bertolak dari sumbernya, meski kita berada dalam cara pandang yang berbeda dan sikap yang tidak sama. Jika ada kebaikan dan kebenaran maka sudah sepatutnya ikut serta memperjuangkan. Bukan sebaliknya, hanya bersemangat

memperjuangkan sesuatu saat menyinggung seseorang atau institusi tertentu.

Dalam konteks kekinian, di sejumlah negara Eropa pasal penghinaan presiden banyak tersebar dalam konstitusi mereka, namun dalam perkembangannya pasal tersebut jarang dan tidak pernah digunakan untuk menghukum. Karena sejak awal para pembuat konstitusi memandang bahwa sebuah jabatan akan beriring dengan tanggung jawab yang melekat kepadanya. Semakin tinggi pohon, maka semakin besar angin yang menerpanya. Disisi lain, si pemilik jabatan tidak mudah 'baper dan caper' dengan secara bijak

memandang bahwa segala bentuk masukan dan kritik adalah bagian dari keadilan yang harus diterima sejak mereka mengemban jabatan tinggi. Saat sorot mata lebih banyak melihat, saat pikiran publik lebih banyak tersita, dan saat ekspresi menjadi lebih banyak dari sebelumnya. hukum alamiah bagi para pemilik jabatan.

Penuaian hak dan kewajiban adalah sebuah cerminan resiprokal yang akan mampu mengukur kredibilitas. Saat ada sebagian pihak yang meminta hak, maka disisi lain dia juga harus secara sadar dan benar menunaikan kewajiban. Bukan sebaliknya, meminta hak terus menerus namun enggan menunaikan kewajiban.

Bergegas menunaikan hak saat menyinggung dirinya, namun enggan menunaikan kewajiban saat tidak selaras dengannya. adil sejak dalam hati dan pikiran itu penting.

Dalam konteks legislasi kekinian perjuangan untuk mendorong pelarangan dan pembatasan minol sesungguhnya menjadi nafas keadilan yang paling nyata. Saat puluhan perda digagas dan menjamur di nusantara, anehnya dalam spektrum yang lebih luas seperti Undang-Undang malah belum ada. Di



iniasi sejak lama, namun berulang kali kandas dengan sebab yang tidak jelas. Beda dengan pembahasan UU Cipta Kerja, tidak perlu waktu lama dan melewati periode dewan.

Kegelisahan akan minol ini bukan hanya berbasis agama, namun juga budaya. Argumentasi yang memandang bahwa pelanggaran minol diskriminatif sesungguhnya seperti berselancar diatas ketidakadilan. Padahal secara jelas daya rusak minol sangat tinggi terhadap kesehatan dan telah menyebabkan tingginya

angka kriminilitas, namun ironisnya disisi lain manfaatnya sangat kecil. Anehnya ada saja pihak-pihak yang bersikeras membahas RUU Minol tidak penting. sungguh tidak adil.

Dalam surat al maidah ayat 8 di Al Qur'an "*Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*"

# Fraksi PKS Konsisten Perjuangkan RUU Larangan Minuman Beralkohol

“Melalui RUU ini kita ingin mempertegas aturan tersebut lebih ketat, lebih jelas, lebih memiliki kepastian hukum mulai dari jenis, pembatasan, hingga sanksi penyalahgunaan atau pelanggaran minuman beralkohol. Dan ini adalah kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kamtibmas.”

## Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (13/11) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan akan konsisten memperjuangkan RUU Minuman Beralkohol (RUU Minol). Diketahui RUU ini diusulkan oleh lintas Fraksi termasuk Fraksi PKS di dalamnya.

“Fraksi PKS memiliki pertimbangan matang mengusulkan regulasi yang mengatur lebih ketat dan tegas penjualan, peredaran, dan konsumsi minimal beralkohol di Indonesia baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis,” ungkap Jazuli.

Pertama, secara filosofis tujuan bernegara melindungi

segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Termasuk di dalam tujuan tersebut mewujudkan masyarakat yang sehat dan bermartabat.

Kedua, secara yuridis berbagai peraturan perundang-undangan telah membatasi dan mengawasi penjualan dan peredaran minuman beralkohol. Namun dinilai belum kuat menegaskan politik hukum untuk membatasi peredaran minuman beralkohol yang realitasnya semakin bebas dijual dan dikonsumsi masyarakat bahkan remaja

hingga anak-anak.

Ketiga, secara sosiologis minuman beralkohol atau minuman keras lebih banyak membawa mudhorot baik bagi kesehatan maupun dampak sosial seperti kejahatan/kriminalitas.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, pada pembahasan pendahuluan di periode lalu prinsipnya semua Fraksi setuju ada pembatasan penjualan dan peredaran minimal beralkohol. Dijual di tempat terbatas dan untuk kalangan atau tujuan terbatas. Tapi realitasnya marak kita temui miras bisa dibeli atau diperoleh bebas oleh remaja bahkan dibuat sendiri dari bahan berbahaya. Pun maraknya kriminalitas umumnya berangkat dari penengkul miras.

“Melalui RUU ini kita ingin mempertegas aturan tersebut lebih ketat, lebih jelas, lebih memiliki kepastian hukum mulai dari jenis, pembatasan, hingga sanksi penyalahgunaan atau pelanggaran minuman beralkohol. Dan ini adalah kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kamtibmas,” pungkas Jazuli.



# KERUGIAN NEGARA LAIN YANG DISEBABKAN OLEH MINUMAN KERAS



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## Amerika Serikat

**249 miliar dollar Amerika Serikat (2010)**

**179 miliar dollar**, biaya atas kerugian produktivitas di tempat kerja.

**28 miliar dollar**, biaya atas pelayanan kesehatan

**13 miliar**, biaya atas kecelakaan lalu lintas

**25 miliar**, biaya atas sistem peradilan pidana

Aturan Alkohol di AS  
Peraturan alkohol secara detail diatur oleh masing-masing 50 negara bagian dengan interpretasi berbeda. Namun, ada peraturan alkohol universal di seluruh AS yakni National Minimum Drinking Age Act (1984) yang mengatur batas umur konsumsi minuman beralkohol

Source: [www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)

## Uruguay

**256,9 juta US Dollar (2015)**

Terbagi dua:

- 1) **46,7 juta US Dollar** (biaya langsung)
- 2) **210 juta US Dollar** (biaya tidak langsung)

Aturan Alkohol di Uruguay  
Law No. 19855 yang mengatur konsumsi minuman beralkohol

Source: [www.ssm.com](http://www.ssm.com)

## Belgia

**906, 1 juta Euro (biaya langsung)**

Mayoritas biaya langsung diakibatkan oleh biaya atas perawatan/hospitalization (743,7 juta Euro / 82%)

**642,6 juta Euro tidak langsung pada tahun 2012**

398,4 juta Euro (62%) adalah biaya tidak langsung akibat kematian dini.

Aturan Alkohol di Belgia  
2009 law for alcohol consumption

Source: Verhoygh, N. et al. *The health-related social costs of alcohol in Belgium.* BMC Public Health 17, 958 (2017).

## Australia

**14,352 miliar dollar Australia (2010)**

**42,1%**, biaya atas kerugian produktivitas.

**25,5%**, biaya atas kecelakaan lalu lintas

**20,6%** biaya atas sistem peradilan pidana.

Peraturan alkohol diatur di tiap negara bagian:

1. Liquor Act 2010 (Negara Bagian Canberra/Australian Capital Territory)
2. Liquor Act 2007 (New South Wales)
3. Liquor Act 1992 (Queensland)
4. LIQUOR ACT 2019 (Northern Territory)
5. Liquor Licensing Act 1997 (South Australia)
6. Liquor Control Reform Act 1998 (Victoria)
7. Liquor Control Act 1988 (Western Australia)
8. Liquor Licensing Act 1990 (Tasmania)

Source: Manning, M., Smith, C., & Mazerolle, P. (2013). *The societal costs of alcohol misuse in Australia. Trends and issues in crime and criminal justice*, (454), 1.



## Sebagaimana yang Dilakukan DPRD Papua

# HNW Dukung Disahkannya RUU Larangan Minol

“Apabila sudah dinyatakan ganja itu dilarang, logisnya alkohol juga dilarang. Maka larangan miras ini tidak tepat bila dikaitkan dengan kepentingan umat Islam saja. Melainkan kepentingan nasional. Dengan tetap mengecualikan berbagai hal yang khas untuk keperluan spesial, seperti upacara adat, keagamaan, penelitian dll

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (13/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid, mendukung bila seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mencontoh kearifan lokal daerah dalam menjadi Peraturan Daerah di Papua, Provinsi yang mayoritas warganya beragama Kristiani, soal larangan minuman beralkohol, baik di level provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

HNW, sapaan akrabnya,

yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, Perda-Perda yang berlaku di Papua itu seharusnya bisa menjadi inspirasi bagi DPR RI dan Pemerintah Pusat soal perlunya upaya menyerap kearifan lokal daerah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) yang sudah dibahas di DPR sejak 2009.

“DPR dan Pemerintah perlu lebih bijak dan cermat, turun ke daerah dan melihat

bagaimana sikap Pemda Papua dan DPRD Papua, serta masyarakat disana terkait adanya peraturan daerah larangan minol ini,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (13/11).

Lebih lanjut, HNW menjelaskan bahwa pelarangan minuman beralkohol di Papua dilakukan sejak diberlakukannya Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol oleh DPRD Papua dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Bahkan, di Kabupaten yang sering disebut sebagai kota Injil; yaitu Manokwari (Provinsi Papua Barat) sudah memiliki Perda sejenis sejak 2006.

Soal pemberlakuan larangan minuman beralkohol, Pemprov Papua lebih tegas lagi dengan diberlakukannya Perda Nomor 22 Tahun 2016 yang mengubah sebagian ketentuan dalam Perda No. 15 Tahun 2013.

“Dalam Perda yang terakhir, sejumlah pasal yang



memberikan pengecualian justru dihapuskan. Jadi, intinya pelarangannya dilakukan secara total,” ujarnya.

HNW menuturkan bahwa Papua hanya satu dari banyak daerah di Indonesia yang telah memiliki Perda larangan miras/minol.

“Daerah-daerah lain yang memiliki perda serupa, di antaranya, adalah Kabupaten Dompu (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi) dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Apalagi, pada 2016 lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga sempat

menegaskan bahwa setiap daerah harusnya mempunyai perda larangan miras, karena bahayanya yang sangat mengancam generasi muda.

Selain itu, HNW menambahkan bahwa aturan pelarangan minuman beralkohol atau minuman keras bukan melulu berkaitan dengan ajaran agama, walaupun seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak setuju apabila umatnya bermabuk-mabukan.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](https://fraksi.pks.id)



# PERDA yang melarang dan mengatur minuman keras

**PERDA kab. Kotawaringin Barat  
No.13 Tahun 2006**  
Tentang Larangan  
Minuman Beralkohol

**PERDA Kab Kutai Timur  
No 2 Tahun 2016**  
Tentang Pengendalian  
dan Pengawasan  
Terhadap Peredaran dan  
Penjualan Minuman Beralkohol

**PERDA Kota Jambi  
No 7 Tahun 2010**  
Tentang Pelarangan  
Pegedaran Dan  
Penjualan Minuman  
Beralkohol Di Tempat Umum

**PERDA Kab. Lampung Tengah  
No 8 Tahun 2017**  
Tentang Pengendalian  
Dan Pengawasan  
Terhadap Peredaran Dan  
Penjualan Minuman Beralkohol

**PERDA Kota Depok  
No 3 Tahun 2018**  
Tentang Pengendalian dan  
Pengawasan Peredaran  
Minuman Beralkohol

**PERDA Kab. Sragen  
No 3 Tahun 2018**  
Tentang Pengendalian dan  
Pengawasan Peredaran  
Minuman Beralkohol

**PERDA Kab. Kulonprogo  
No 11 TAHUN 2008**  
Tentang Larangan dan Pengawasan  
Minuman Beralkohol dan  
Minuman Memabukkan Lainnya

**PERDA Kab. Kolaka Utara  
No. 1 Tahun 2014**  
Tentang Perubahan Atas Perda  
No 11 Tahun 2007  
Tentang Larangan Memproduksi  
Mendedarkan Dan Mengkomsumsi  
Minuman Beralkohol

**PERDA Kab. Bone Bolango  
No 10A Tahun 2008**  
Tentang Retribusi Izin  
Usaha Perdagangan  
Minuman Beralkohol

**PERDA Kab. Konawe Utara  
No 18 Tahun 2012**  
Tentang Retribusi Izin  
Tempat Penjualan  
Minuman Beralkohol

**PERDA Prov  
Kallimantan Selatan  
No. 7 Tahun 2008**  
Tentang Pengendalian  
Dan Pengawasan Peredaran  
Minuman Beralkohol

**PERDA Kota  
Banjarmasin  
No. 10 Tahun 2017**  
Tentang Pengawasan Dan  
Pengendalian Penjualan  
Minuman Beralkohol

**PERDA Kab. Pulau Morotai  
No 6 Tahun 2018**  
Tentang Pengendalian  
dan Pengawasan  
Minuman Beralkohol

**PERDA Kab. Manokwari  
No. 5 Tahun 2006**  
Tentang Larangan Pemasukan,  
Penyimpanan, Pegedaran  
dan Penjualan Serta Memproduksi  
Minuman Beralkohol

**PERDA Kab. Banggai  
No 9 Tahun 2011**  
Tentang Retribusi Izin  
Tempat Penjualan  
Minuman Beralkohol

**PERDA Kab. Buton  
No. 14 Tahun 2013**  
Tentang Retribusi Izin  
Tempat Penjualan  
Minuman Beralkohol

**PERDA Prov. Papua  
No 15 tahun 2013**  
Tentang Pelarangan  
Produksi, Pegedaran  
dan Penjualan  
Minuman Beralkohol  
serta Instruksi  
Gubernur Papua  
No. 3/Instr-Gub/ 2016

# Legislator PKS Dorong Percepatan RUU Minol Untuk Melindungi Masyarakat

“RUU Minuman Beralkohol ini nantinya dapat memperkuat Pemerintah Daerah dalam mengatur peredaran minuman beralkohol di daerahnya, sehingga dapat melindungi masyarakat khususnya remaja dari dampak negatif yang ditimbulkan minuman beralkohol.”

## **AMIN AK, M.M.**

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (13/11) — RUU tentang Minuman Beralkohol saat ini sudah mulai masuk dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR RI. Sebagai salah satu Fraksi yang mengusulkan RUU tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) akan mendorong percepatan penyelesaian RUU tentang Minuman Beralkohol di DPR.

“Kami menilai RUU ini perlu diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk minuman beralkohol.” ujar Amin, Ak Anggota Komisi VI F-PKS DPR RI.

“Kami akan berupaya mendorong RUU ini agar bisa segera dibahas dan

diselesaikan, mengingat dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol di masyarakat sangat mengkhawatirkan.” ujar Amin, Ak.

Menurut Amin, Ak. saat ini peraturan yang mengatur peredaran minuman beralkohol yang berlaku belum terlalu kuat. Meskipun sudah diatur dalam UU KUHP dan beberapa Peraturan Daerah, namun UU yang spesifik mengatur peredaran minuman beralkohol secara khusus masih belum ada.

“RUU Minuman Beralkohol ini nantinya dapat memperkuat Pemerintah Daerah dalam mengatur peredaran minuman

beralkohol di daerahnya, sehingga dapat melindungi masyarakat khususnya remaja dari dampak negatif yang ditimbulkan minuman beralkohol.” ujar Amin, Ak.

Amin, Ak mengatakan RUU Minuman Beralkohol yang saat ini sudah masuk dalam agenda pembahasan di Baleg DPR RI akan memuat sejumlah larangan dan pembatasan peredaran minuman beralkohol di Indonesia.

“Tak hanya memperketat jumlah minuman beralkohol yang beredar, jam dan lokasi peredarannya juga akan dibatasi,” ungkapnya.

Hal ini, lanjutnya, untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah agar tidak mudah mendapatkan minuman beralkohol tambah.

“Untuk menghilangkan keresahan masyarakat akibat korban minuman beralkohol yang terus bertambah, RUU Minuman Beralkohol harus segera dibahas dan disahkan,” tegas Amin, Ak yang juga Anggota Baleg DPR RI.







FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



World Health  
Organization

# MENGAPA RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL PENTING UNTUK SEGERA DISAHKAN

Merujuk pada data dan keterangan WHO, alkohol berbahaya bagi kesehatan; dan dapat meningkatkan risiko cedera dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan dapat menyebabkan keracunan.



- **Lebih dari 3 juta orang meninggal setiap tahun** - satu orang setiap 10 detik - karena penyebab terkait alkohol.
- **Penggunaan alkohol yang berbahaya merupakan hambatan utama** bagi pembangunan berkelanjutan dan berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan pengguna alkohol, keluarga, kolega, dan komunitas mereka.
- **Konsumsi alkohol menyebabkan kematian dan kecacatan relatif di awal kehidupan**, mengurangi kapasitas ekonomi masyarakat: 13,5% dari semua kematian di kalangan remaja yang berusia 20 hingga 29 tahun disebabkan oleh alkohol.
- **Lebih dari 5% dari beban penyakit dan cedera global** disebabkan oleh alkohol.
- **Penggunaan alkohol yang berbahaya merupakan faktor penyebab di lebih dari 200 penyakit, kondisi kesehatan dan cedera**, termasuk:
  - Penyakit tidak menular, termasuk kanker dan penyakit kardiovaskular;
  - Kematian dan kecacatan, termasuk kecelakaan dan kematian di tempat kerja dan lalu lintas jalan;
  - Kekerasan interpersonal, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan anak;
  - Penyakit menular, termasuk TB dan HIV / AIDS; dan
  - Morbiditas ibu dan anak



## Indonesia Darurat Minuman Beralkohol

# Bukhori: Selamatkan Masa Depan Generasi Muda

Harapannya, dengan menekan jumlah peredaran minuman beralkohol di Indonesia melalui peraturan yang memadai, akan tercipta sumber daya manusia Indonesia yang sehat secara jasmani dan rohani serta kondisi masyarakat yang hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana amanat UUD 1945

### **KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (13/11) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sudah dalam keadaan amat darurat minuman beralkohol.

Pasalnya, lanjut Bukhori, merujuk hasil riset kesehatan dasar (Riskesmas) Kemenkes, jumlah remaja yang mengonsumsi minuman beralkohol masih di angka 4,9%. Selain itu, menurut data WHO pada 2011 menunjukkan sebanyak 2,5 juta penduduk dunia yang meninggal akibat

alkohol, sekitar 9% kematian tersebut terjadi pada usia 15-29 tahun atau usia produktif.

"Kita membutuhkan pendekatan yang lebih progresif untuk menyelamatkan masa depan bangsa dari dampak merusak minuman beralkohol (minol). Sebab, model regulasi yang ada saat ini hanya bertumpu pada pendekatan pengendalian semata sehingga terbukti gagal bila mengacu pada data yang menunjukkan sekitar 58% tindakan kriminal di Indonesia dipicu oleh minuman beralkohol," ungkapnya.

Ironisnya, sekitar 14,4 juta remaja di Indonesia telah teridentifikasi sebagai pengonsumsi minol. Artinya, bonus demografi yang kelak kita peroleh di kemudian hari, juga dibayangi oleh bahaya minuman beralkohol yang mengintai generasi usia produktif kita bila tidak ada perhatian serius yang melarang minuman beralkohol," papar Bukhori di Jakarta, Jumat (13/11)

Anggota Komisi VIII ini menilai, manusia sebagai makhluk berakal, secara fitrah, dirinya menolak minuman beralkohol, kecuali dalam keadaan tertentu. Alasannya, minuman yang memabukkan sekurang-kurangnya akan merugikan tiga dampak negatif.

"Pertama, dampak buruk bagi kesehatan. Minol bisa mengakibatkan kerusakan hati, ginjal, gangguan jantung, bahkan kelemahan kognitif bagi anak di kemudian hari bila dikonsumsi oleh Ibu hamil. Kedua, adalah dampak psikis, antara lain, gangguan daya ingat dan kemampuan berbahasa, serta perubahan



kepribadian ke arah destruktif," sambungnya.

Terakhir, demikian Bukhori melanjutkan, adalah dampak sosial. "Secara fakta sosial, para pemabuk adalah biang kerok terjadinya gangguan sosial di tengah masyarakat seperti tawuran maupun tindak kejahatan lainnya sehingga merugikan orang lain," bebarnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini mencermati bahwa regulasi yang sudah ada (eksisting) bersifat parsial dan tidak komprehensif.

"Misalnya dalam ketentuan KUHP, pendekatan hukum

hanya menasar pada ranah penjualan dan konsumsi dengan sanksi pidana dan penjara yang lemah. Apalagi, tidak ada klausul yang tegas melarang konsumsi minol di KUHP," terang Bukhori.

Dengan demikian, KUHP dinilai tidak cukup memadai untuk melakukan rekayasa sosial di masyarakat dalam rangka menciptakan generasi yang bebas minuman beralkohol.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)

# Waspadai RUU Coast Guard China

Kongres Rakyat Nasional Cina bulan lalu merancang undang-undang (Draft UU) yang direvisi, yang belum disahkan, ungkap laporan blog undang-undang China, NPC Observer, Rabu, dirilis situs Stars and Stripes, 5 November 2020.

Penjaga pantai akan diberi wewenang untuk menggunakan senjata “dalam kasus pelanggaran hukum oleh organisasi nasional atau individu,” menurut draf yang diterjemahkan. Ini juga menyetujui “semua tindakan yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran dan menghilangkan bahaya di tempat”.

Sumber : jakartagreater.com/



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



Wajar saja jika beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia khawatir atas RUU yang sedang digodok oleh China. Pasalnya, ada kecurigaan kuat China akan menggunakan RUU tersebut untuk melanggengkan klaim sepihaknya di Laut China Selatan

**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi I DPR RI

# Toriq Peringatkan Agar Indonesia Waspadai RUU Coast Guard China

“Wajar saja jika beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia khawatir atas RUU yang sedang digodok oleh China. Pasalnya, ada kecurigaan kuat China akan menggunakan RUU tersebut untuk melanggengkan klaim sepihaknya di Laut China Selatan”

## KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (13/11) — Timbul kekhawatiran pada beberapa negara ASEAN ketika pada 4 November lalu Kongres Rakyat Nasional China mengumumkan rancangan undang-undang baru yang mengintegrasikan penjaga pantai (Coast Guard) negaranya ke dalam unit militer.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat mengatakan wajar ketika beberapa negara beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina dan Malaysia Khawatir atas RUU yang berpotensi memberi lampu hijau kepada

penjaga pantai Tiongkok (China) untuk menggunakan senjata di perairan yang dianggap di bawah yurisdiksinya.

“Wajar saja jika beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia khawatir atas RUU yang sedang digodok oleh China. Pasalnya, ada kecurigaan kuat China akan menggunakan RUU tersebut untuk melanggengkan klaim sepihaknya di Laut China Selatan”, ungkapnya.

Toriq menegaskan Indonesia memang tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut

bersengketa dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan. Namun, belakangan aktivitas China di dekat perairan Natuna kian mengkhawatirkan Jakarta.

“Kapal China beberapa kali dilaporkan melanggar batas wilayah laut Indonesia. Bulan lalu kapal Penjaga Pantai milik China memasuki wilayah Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia”, ungkap Toriq.

Menurut Aleg asal PKS, RUU yang diusulkan datang ketika Penjaga Pantai China minggu ini memecahkan rekornya untuk jumlah hari yang dihabiskan dalam satu tahun kalender di dekat Kepulauan Senkaku, yang dikendalikan Jepang tetapi juga diklaim oleh China dan Taiwan.

“RUU tersebut diumumkan setelah China menyatakan Amerika Serikat yang merupakan sekutu Jepang melanggar kedaulatannya dengan mengirim kapal angkatan laut melalui perairan yang menjadi sengketa”, ungkap Toriq  
la menambahkan menurut



draf yang diterjemahkan, Penjaga pantai China akan diberi wewenang untuk menggunakan senjata 'dalam kasus pelanggaran hukum oleh organisasi nasional atau individu,' bahkan menyetujui 'semua tindakan yang diperlukan untuk menghentikan pelanggaran dan menghilangkan bahaya di tempat'.

Anggota Komisi I menilai Indonesia sangat menghormati hak setiap negara untuk membuat undang-undang nasionalnya. Namun, Indonesia sebaiknya terus melakukan komunikasi dengan China

mengenai undang-undang tersebut agar tidak berdampak negatif bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan.

“Sebagai bentuk kewaspadaaan, Saya berharap Menteri Luar Negeri terus mengawasi proses pembuatan undang-undang soal Penjaga Pantai yang digodok oleh Pemerintah China. Dan memastikan RRU tersebut tidak berdampak negatif bagi stabilitas di Laut China Selatan khususnya Laut Natuna Utara” ungkap Toriq.

**Pangdam Perintahkan Prajurit Turunkan  
Baliho Habib Rizieq**

# Pimpinan Komisi I: Terus Terang Saya Gagal Paham

Kalau dia diminta bantuan karena Satpol PP enggak berani nurunin, enggak apa-apa, tapi bukan TNI yang harusnya turun tangan. Dia (TNI) harusnya hanya menjaga, bukan ikut menurunkan

**Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengaku terheran-heran dengan pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dukung Abdurachman yang secara terang-terangan mengakui telah memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho Habib M. Rizieq Shihab.

"Terus terang saya gagal paham ada anggota TNI melakukan pencopotan baliho, itu bukan tupoksinya dia," ucap Abdul Kharis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (20/11).

Legislator dari Fraksi PKS ini menerangkan, jika dalam pencopotan baliho itu

sebenarnya TNI hanya sebatas diminta bantuan untuk mengamankan Satpol PP yang tengah bertugas. Menurutnya itu tidak masalah.

"Tapi kalau misalnya TNI diminta bantuan untuk mengamankan Satpol PP pada saat menurunkan baliho Habib M. Rizieq Shihab, bukan kemudian tentara yang di depan," ucapnya.

"Karena, tupoksinya bukan untuk itu. Kalau di BKO-kon diminta bantuannya boleh, tapi pekerja utama adalah mereka yang punya tupoksi itu, gitu lho," ujar Abdul Kharis menambahkan.

Disinggung mengenai

Pangdam Jaya telah melampaui tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara dengan memerintahkan anggotanya menurunkan baliho Habib Rizieq, Abdul Kharis hanya mengatakan, seharusnya TNI paham dengan tugas dan fungsinya.

"Kalau dia diminta bantuan karena Satpol PP enggak berani nurunin, enggak apa-apa, tapi bukan TNI yang harusnya turun tangan. Dia (TNI) harusnya hanya menjaga, bukan ikut menurunkan," tutupnya.





# Nasir Djamil: Tidak Bisa Pilkada Dijadikan Kambing Hitam oleh Pelanggar Prokes

Menurut saya tidak bisa pilkada dijadikan kambing hitam oleh pelanggar protokol kesehatan. Sepegetahuan kami di Komisi II, monitoring dan evaluasi protokol kesehatan dilakukan dalam rentang waktu harian, mingguan dan bulanan.

## H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Komisi II DPR RI

Kegagalan mengantisipasi kerumunan atau pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Jakarta tak bisa serta merta mengkambinghitamkan Pilkada 2020. Terlebih pesta demokrasi di 270 daerah ini berlangsung di 9 provinsi dan diikuti lebih dari 100 juta pemilih.

"Menurut saya tidak bisa pilkada dijadikan kambing hitam oleh pelanggar protokol kesehatan. Sepegetahuan kami di Komisi II, monitoring dan evaluasi protokol kesehatan dilakukan dalam rentang waktu harian, mingguan dan bulanan," ujar Anggota Komisi II DPR RI Nasir Djamil, Rabu

(18/11/2020).

Selain itu, kata dia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah mengatur protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan pilkada, gugus tugas Covid-19 juga ikut mengontrol realisasinya di lapangan. Sekalipun tahapan pendaftaran pasangan calon muncul sejumlah pelanggaran dan hingga kini jumlahnya hanya 2,2% dalam keseluruhan tahapan pilkada.

"Angkanya kecil tapi tidak boleh dianggap remeh. Saya menilai dan melihat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sangat cerewet soal protokol

covid-19 dan menegur dan mengumumkan ke publik daerah yang melanggar protokol covid-19," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin menilai protokol kesehatan tidak boleh diabaikan. Digelar atau tidak pilkada 2020 semua masyarakat mesti menjalankan aturan ini.

"Kalau pun tidak ada pilkada, pelanggaran protokol kesehatan harus tetap ditindak oleh kepolisian. Apalagi di daerah yang ada peraturan daerah terkait itu," terangnya. Ia mengatakan



pelanggaran protokol kesehatan di pilkada akan ditangani dengan penerapan sanksi. "Nah untuk yang urusan kegiatan pilkada, ada ruang Bawaslu menjalankan kewenangannya, mencegah, memberi surat peringatan, membubarkan. Dan itu sudah kita lakukan," ujarnya.

Pengamat Politik Adi Prayitno juga menyatakan pandangan yang sama. Kegagalan mengantisipasi kerumunan yang diarahkan protokol kesehatan covid-19

tidak patut menyamakan dengan kasus di pilkada.

Seharusnya pemerintah daerah sigap mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran ini.

"Terkesan penindakan pelanggaran protokol setelah ada kejadian, bukan dicegah sebelum terjadi kerumunan. Seperti yang terjadi belakangan di bandara dan petamburan. Mestinya dicegah dan tidak agak tak berkerumun," pungkasnya. [

## Jelang Pilkada Serentak

# Habib Aboe Ingatkan Pentingnya Menjaga Persatuan dan Kesatuan

“Kondisi keamanan penting dalam menjaga stabilitas kamtibmas, karena ini terkait erat dengan persatuan dan kesatuan. Oleh karenanya saya minta Polda Kalsel memperhatikan kondisi Pilgub Kalsel dan Pilkada Balangan”

### **HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI**

Anggota Komisi III DPR RI

Banjarmasin (19/11) — Jelang Pilkada di Kalimantan Selatan, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Al-Habsy mengingatkan agar semua pihak mengedepankan persatuan dan kesatuan.

“Pilkada memang suatu hal yang penting untuk pergantian pemimpin daerah. Namun kontestasi ini tidak boleh sampai mengganggu kondisi persatuan dan kesatuan. Karena rusaknya persatuan akan mengganggu kondisi bangsa, dan juga akan merugikan nanti

Bupati terpilih,” ujar pria yang akrab disapa Habib Aboe di Kabupaten Balangan pada Rabu, (18/11/2020).

Habib Aboe berharap kondisi keamanan di Pilkada Balangan akan berlangsung dengan aman.

“Kondisi keamanan penting dalam menjaga stabilitas kamtibmas, karena ini terkait erat dengan persatuan dan kesatuan. Oleh karenanya saya minta Polda Kalsel memperhatikan kondisi Pilgub Kalsel dan Pilkada Balangan”, papar

anggota Komisi III tersebut.

“Tentunya aspek keamanan dan persatuan bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian. Semua pihak memiliki tanggung jawab bersama, baik penyelenggara pemilu, pengawas maupun peserta. Oleh karenanya perlu kesadaran bersama untuk mengedepankan suasana persatuan dalam berbagai strategi kampanye yang dijalankan oleh Paslon maupun tim suksesnya”, terang Ketua MKD DPR RI ini.

Secara umum Habib meyakini, seluruh proses Pilkada akan berjalan dengan baik, tertib dan aman.

“Sejatinya buhunan Banjar ini masyarakat yang tidak mau rebut-ribut, tidak suka konflik. Karenanya saya sangat yakin semua proses Pilkada di Kalsel akan mengedepankan persatuan dan dapat di gelar secara aman” pungkas Anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan 1 ini.



# Pemerintah diminta Batalkan Permen Terkait Pembukaan Hutan Lindung untuk Food Estate

“Pembukaan lahan Gambut (PLG) 1,4 juta hektar untuk pertanian pada dasawarsa 1990an harusnya jadi pembelajaran berharga buat kita akan rusaknya ekosistem dan hutan. Lebih spesifik, Hutan Papua adalah paru-paru dunia yang tersisa serta habitat mega bio diversity Indonesia.

## drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (18/11) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Slamet menentang kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.

Slamet menunjukkan, bahwa Pada pasal 19 peraturan tersebut di sebutkan bahwa pembangunan food estate dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung.

“Permen tersebut harus dicabut demi hukum, sebab secara terang-terangan melanggar ketentuan perundangan”, respon keras Anggota FPKS ini.

Politisi PKS ini merujuk pada UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 26 menyatakan secara tegas disebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung hanya berupa pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Anggota DPR RI komisi IV yang bermitra dengan KLHK ini mengingatkan pemerintah agar

belajar dari sejarah kelam rusaknya hutan.

Kerusakan hutan yang meluas, lanjutnya, akan sulit untuk dipulihkan seperti sedia kala. Padahal, Negara Indonesia ini mesti mengembalikan Pekerjaan Rumah mengembalikan lahan area hutan yang rusak menjadi kritis yang hingga kini belum selesai pekerjaannya.

“Pembukaan lahan Gambut (PLG) 1,4 juta hektar untuk pertanian pada dasawarsa 1990an harusnya jadi pembelajaran berharga buat kita akan rusaknya ekosistem dan hutan. Lebih spesifik, Hutan Papua adalah paru-paru dunia yang tersisa serta habitat mega bio diversity Indonesia. Apa kita kembali mau merusaknya ?, tentu semua pihak warga dunia termasuk Indonesia pasti menjawab tidak”, urai Slamet.

Anggota DPR RI asal Sukabumi ini juga mempertanyakan pihak yang diuntungkan secara ekonomi dari program pertanian skala besar ini. Ia mengingat-



kan agar kepentingan petani dan masyarakat sekitar hutan dalam program ini akan sirna semua.

“Jangan sampai food estate ini hanya bentuk kolaborasi negara dan investasi”, ketusnya.

Slamet juga menyinggung pentingnya perhutanan sosial. Hingga saat ini, pengelolaan perhutanan sosial masih belum merata dilakukan pada sepanjang area pinggir hutan Indonesia. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk memberdayakan masyarakat yang menyunculkan simbiosis

mutualisme dimana rakyat sekitar hutan terberdayakan dan meningkat taraf ekonomi kehidupannya, di saat bersamaan, pemerintah terbantu melestarikan hutan tanpa mengeluarkan biaya SDM yang sangat besar untuk menjaganya.

“Seharusnya pemerintah mengakselerasi program perhutanan sosial yang saat ini berjalan lamban realisasinya. Sehingga akses rakyat terhadap hutan menjadi besar dan petani masyarakat hutan semakin sejahtera”, tutup Slamet.

# Pemerintah Harus Tegas terhadap Perilaku Perusahaan yang Merusak Hutan

Pemerintah tidak boleh menutup mata dan harus bersikap tegas terhadap berbagai perilaku perusahaan yang telah mengan-cam kerusakan hutan dan lingkungan kita

## H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Sumbawa (14/11) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, merespon adanya investigasi yang telah mengungkap perilaku perusahaan yang membakar lahan untuk perluasan lahan sawit yang mengakibatkan kerusakan hutan di Papua dan hilangnya hutan adat beralih fungsi menjadi hamparan kebun kelapa sawit.

Menurut Johan, investigasi ini telah memberikan fakta tentang situasi sawit dalam Kawasan hutan kita.

"Pemerintah tidak boleh menutup mata dan harus bersikap tegas terhadap berbagai perilaku perusahaan yang telah mengancam

kerusakan hutan dan lingkungan kita", ujar Johan.

Politikus PKS ini menegaskan bahwa praktik pembakaran untuk pembukaan lahan adalah tindakan yang melanggar hukum dan Pemerintah harus segera melakukan penataan terhadap keterlanjuran sawit di dalam Kawasan hutan.

Johan menyebutkan saat iniutupan kelapa sawit di dalam Kawasan hutan, total luasnya telah mencapai 3.408.639 Ha sehingga pemerintah harus tegas melakukan penataan yang sesuai dengan fungsi Kawasan.

"Contohnya untuk Kawasan konservasi harus dilakukan

upaya menuju restorasi ekosistem," papar Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini menyampaikan bahwa laju deforestasi atau kerusakan hutan kita mencapai 462,4 Hektare per tahun dan terdapat 3,43 juta hektare perkebunan sawit di Kawasan hutan.

Atas dasar ini, Johan berpendapat agar penetapan luas dan fungsi hutan tidak menggunakan mekanisme pasar karena akan mendorong konversi untuk keperluan lain.

"Saya mendesak pemerintah untuk segera mengatasi dampak buruk dari perubahan Kawasan hutan untuk pembangunan di luar sector kehutanan," urai Johan.



Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini berharap agar pemerintah segera memperkuat Lembaga yang berwenang mencegah dan memberantas perusahaan hutan.

"Hasil investigasi terhadap kondisi kerusakan hutan papua harus jadi peringatan bagi kita sebab seringkali pemilik usaha dari korporasi raksasa berpeluang tak terjerat hukum karena bukan pelaku lapangan," imbuh Johan.

Selanjutnya Johan mengingatkan pemerintah agar tegas dan adil dalam penegakan hukum di sector kehutanan ini.

"Jangan sampai hanya berani menyentuh perkebunan rakyat kecil yang di bawah 5 hektar namun seringkali tidak mampu menyentuh korporasi besar atau perusahaan asing seperti yang terjadi di hutan Papua", tutup Johan.



# Andi Akmal Minta Pemerintah Serius Mengelola Petani Muda Modern Berbasis Digital

Intinya adalah bagaimana regenerasi pelaku usaha pertanian ini dapat digalakkan. Dengan teknologi informasi yang begitu cepat, sistem logistik pengiriman yang semakin digitalisasi, diharapkan masyarakat Indonesia melahirkan generasi muda yang mampu memanfaatkan potensi alam Indonesia yang dapat optimal di bidang pertanian dan perikanan

**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (18/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin pada rapat di DPR bersama Pemerintah dalam masa persidangan II tahun sidang 2020-2021, meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Pertanian agar memberikan porsi lebih untuk mengelola petani muda yang sesuai dengan tuntutan zaman saat ini.

Menurut Akmal, maksud tuntutan zaman saat ini adalah, mulai dari sistem produksi hingga pemasarannya

mengadopsi sistem digital pada instrumen pelaksanaannya.

"Masa pandemi ini secara tidak sadar telah memacu kreativitas seluruh masyarakat berbagai profesi untuk menyesuaikan diri agar selamat dalam menjalankan dunia usahanya. Dibidang pertanian, menciptakan trend mengakibatkan produk yang biasa saja sebelum-sebelumnya, menjadi buruan setiap pencinta produk tanaman hingga turut merubah perilaku. Sebagai contoh tanaman hias yang asalnya tumbuh di

hutan kini diburu, begitu juga tanaman yang daunnya bolong-bolong dulu biasa saja, sekarang menjadi tanaman idola", tutur Akmal detail.

Politisi PKS ini menyampaikan pada Pemerintah, bahwa trend sebuah produk terutama hortikultura jenis hias tidaklah bertahan lama.

"Sehingga ketika pesona sebuah produk tanaman hias sudah mulai sirna, mesti diciptakan kembali trend-trend baru," imbuhnya.

Kondisi tersebut, menurut



Akmal, bagi anak muda sangat menarik karena ada tantangan dan hal baru. Hanya saja perlu pendampingan program yang menarik, dan tentunya bila program ini dari pemerintah akan semakin menarik dan jelas.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini juga mencontohkan bukan hanya produk hortikultura yang merupakan core kementerian pertanian.

Di bidang perikanan, trend peliharaan ikan hias di rumah juga menjadi peluang menarik bagi anak-anak muda. Sebagai contoh memelihara

ikan cupang, ikan chana dan ikan koi, merupakan salah satu perilaku masyarakat yang lagi trend pada masa pandemi.

"Intinya adalah bagaimana regenerasi pelaku usaha pertanian ini dapat digalakkan. Dengan teknologi informasi yang begitu cepat, sistem logistik pengiriman yang semakin digitalisasi, diharapkan masyarakat Indonesia melahirkan generasi muda yang mampu memanfaatkan potensi alam Indonesia yang dapat optimal di bidang pertanian dan perikanan", tutup Andi Akmal Pasluddin.

## Temuan Ombudsman Soal Kompensasi Keluarga Korban Lion Air

# Aleg PKS: Kemenhub Segera Tindak Lanjuti

Dimana bentuk maladministrasi yang terjadi adalah penundaan berlarut oleh Menteri Perhubungan RI dalam menyelesaikan proses pemberian ganti rugi dan penyimpangan prosedur oleh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia dalam proses pemberian ganti rugi kepada ahli waris korban kecelakaan

### H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (15/11) — Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama (SJP), mendesak agar Kementerian Perhubungan menepati janjinya dihadapan Komisi V DPR RI. Berkaitan dengan masih samanya jumlah keluarga korban yang mendapatkan kompensasi sejak tahun lalu sampai sekarang menunjukkan kuatnya dugaan Ombudsman tentang penundaan berlarut oleh Kementerian Perhubungan dalam menindaklanjuti ketidakpatuhan Lion Air dan PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia dalam proses pemberian kompensasi.

Hal tersebut menyusul keterangan Ombudsman RI yang telah mengeluarkan LAHP

(Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) dengan Nomor Registrasi 0222/IN/IV/2019/JKT mengenai dugaan penundaan berlarut oleh Kementerian Perhubungan RI dalam menindaklanjuti ketidakpatuhan PT.Lion Mentari Airlines dan PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia dalam proses pemberian ganti rugi kepada ahli waris korban kecelakaan Pesawat Lion Air dengan registrasi PK-LQP dalam penerbangan JT 610 tanggal 29 Oktober 2018, Jakarta, September 2020.

"Seperti diketahui, hingga saat ini proses ganti rugi kecelakaan pesawat tersebut belum juga selesai, sebab baru 75 keluarga ahli waris dari total

dari 189 korban tewas pesawat tersebut yang sudah menerima ganti rugi," kata Suryadi.

Ia menambahkan, bahwa terkait berlarutnya masalah ini, FPKS pada bulan November 2019 telah menerima beberapa perwakilan ahli waris untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah melalui Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKS.

"Belum selesainya kompensasi yang wajib diberikan oleh pihak Lion Air kepada pihak keluarga sebesar minimal Rp1,25 miliar sesuai Pasal 3 Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara disebabkan adanya beberapa keluarga ahli waris yang menolak untuk menandatangani dokumen R&D (Release and Discharge). Dokumen tersebut mewajibkan keluarga ahli waris melepaskan hak menuntut kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan," tambah Suryadi.

Suryadi mengatakan, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada ketentuan mengenai hal ini, artinya ahli waris tetap berhak mendapatkan ganti rugi tanpa harus menandatangani



dokumen R&D tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa, atas kejadian tersebut, saat itu FPKS telah mengeluarkan beberapa rekomendasi sebagaimana dimuat dalam diantaranya yg pertama, mendesak Pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara untuk memberikan peringatan kepada pihak Lion Air untuk segera menyelesaikan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa meminta syarat apapun kepada ahli waris.

Dan kedua, mendesak

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk merevisi Permenhub No. 77 Tahun 2011 agar memberikan batas waktu dan menetapkan sanksi keterlambatan kepada pihak pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara agar dapat menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 3 bulan segera setelah penumpang yang berada dalam pesawat udara yang mengalami kecelakaan dinyatakan meninggal.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)

## Evaluasi Anggaran 2020

# Syahrul Aidi Sampaikan Empat Issue pada Mendes

Kita lihat kemarin ada program cukup bernas yang mesti dapat anggaran namun karena ada keterbatasan anggaran, maka diharapkan untuk tahun berikutnya mesti dapat dukungan anggaran yang lebih memadai. Dan saya secara pribadi sebagai mitra Komisi V mendukung agar anggaran Kementerian Desa tahun 2021 ditingkatkan

### H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (18/11) — Pada Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT), Anggota Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat sebagai Anggota Komisi V menyampaikan beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan oleh Menteri Desa PDT dan jajarannya terkait pelaksanaan dan pengelolaan Pemerintahan desa se-Indonesia.

Rapat dengan materi evaluasi pelaksanaan APBN 2020

dan Penyampaian Laporan hasil kunjungan kerja reses dan spesifik Komisi V DPR RI tahun 2020 yang dilaksanakan pada Rabu (18/11), dihadiri oleh Anggota Komisi V DPR RI beserta Menteri Desa PDT beserta jajarannya.

Setidaknya ada empat issue menarik yang disampaikan oleh Syahrul Aidi kepada Menteri Desa, yaitu pertama terkait tentang jomplangnya anggaran Kementerian Desa PDT dibandingkan dengan mitra komisi V lainnya. Dan dia secara

pribadi mendukung agar anggaran Kementerian Desa PDT tahun anggaran 2021 agar dinaikkan.

"Karena kita lihat kemarin ada program cukup bernas yang mesti dapat anggaran namun karena ada keterbatasan anggaran, maka diharapkan untuk tahun berikutnya mesti dapat dukungan anggaran yang lebih memadai. Dan saya secara pribadi sebagai mitra Komisi V mendukung agar anggaran Kementerian Desa tahun 2021 ditingkatkan" kata Syahrul.

Kedua, lanjutnya, tidak teraturnya pencairan anggaran dana desa setiap tahunnya. Bahkan terkadang dana desa itu pada tahap akhir baru ditransfer pada bulan Desember setiap tahunnya. Sehingga banyak kades yang takut untuk menggunakan anggaran tersebut.

"Dan itu mereka ragu, antara mau mencairkan dana untuk dilaksanakan atau tidak. Jika mereka laksanakan tidak akan selesai. Jika tidak dilaksanakan maka program mereka tidak terealisasi," papar Syahrul. Kemudian evaluasi ketiga,



Syahrul Aidi menyoroti gaji kepala desa yang tidak sesuai dengan beban dan tanggung jawab seorang kades. Sebagaimana diketahui, gaji kades itu adalah 2,5 juta per bulannya. Nilai tersebut tidak sesuai dengan beban sebagai penanggung jawab anggaran atau pelayanan kepada masyarakat.

"Kades menerima tamu dari masyarakat, pejabat daerah, LSM, camat hampir tiap harinya. Sementara anggaran ini tidak ada diregulasi oleh Kemendes. Maka harapan saya, Kemendes dapat mencari solusi dan membuat regulasi agar beban Kades ini ada solusinya," terangnya yang merupakan tamatan Universitas Al Azhar Mesir ini.

Sedangkan evaluasi yang ke empat, Syahrul Aidi menyoroti tentang kiprah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang tidak tepat sasaran. Dia menilai Bumdes harusnya tidak menjadi kompetitor bagi pelaku usaha di desa. Bumdes harus menjadi pendorong pelaku usaha agar makin mapan usahanya.

"Contoh, Bumdes itu ada yang membuat mini market, yang masyarakat juga membuat mini market. Harusnya Bumdes bukan saja berpikir mendapat untung, namun juga menggiring masyarakat agar berusaha. Jadi Bumdes dapat membantu masyarakat dalam berusaha, bukan menyangi masyarakat dalam berusaha," terangnya Syahrul Aidi mengakhiri.



IKUTILAH

مسابقة قراءة الكتاب فتح المعين

# LOMBA BACA KITAB KUNING<sup>IV</sup> TINGKAT NASIONAL 2020



Persembahan  
**Fraksi PKS DPR RI**  
Dalam Rangka Peringatan  
Hari Santri Nasional 2020  
dan Peringatan 16 Tahun  
Fraksi PKS DPR RI

## KITAB YANG DIBACA

Kitab yang dibaca adalah Kitab  
**Fathul Mu'in** Karya Syaikh  
Zainuddin Abdul Aziz Al-Malbari

## SYARAT PESERTA

- 1 Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2 Putra/Putri yang tercatat sebagai santri pesantren
- 3 Usia 17 - 25 tahun
- 4 Pendidikan minimal Madrasah Aliyahatau yang sederajat
- 5 Mendapat rekomendasi dari pimpinan pondok pesantren
- 6 Belum pernah menjadi juara 1 - 3 Lomba Kitab Kuning FPKS tingkat Nasional (2016-2018)



## BERHADIAH UTAMA UMRAH

## Raih Juara Rebut Hadiyahnya

Juara 1	<b>UMRAH</b>	Juara Harapan 1	<b>Rp 15.000.000,-</b>
Juara 2	<b>Rp 25.000.000,-</b>	Juara Harapan 2	<b>Rp 10.000.000,-</b>
Juara 3	<b>Rp 20.000.000,-</b>	Juara Harapan 3	<b>Rp 5.000.000,-</b>

Setiap Peserta akan mendapat sertifikat yang ditanda tangani oleh  
Ketua Majelis Syura, Presiden PKS dan Ketua Fraksi PKS DPR RI

## AGENDA PELAKSANAAN

**Masa Pendaftaran**  
22 Oktober - 15 November 2020

**Babak Penyisihan di 34 Provinsi**  
Babak Penyisihan akan diselenggarakan antara 16 November 2020 hingga 13 Desember 2020 bertempat di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) di 34 Provinsi se Indonesia.

**Babak Final**  
22 Desember 2020

## DEWAN JURI

**KH. Syuhada' Syarkun, S.Ag., M.HI.**  
(Pesantren Tebuireng-Jombang Jatim)  
**KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA**  
(Ketua Umum MAPADI)  
**Dr. KH. Ali Akhmadi, MA, Al-Hafidz**  
(Ketua BPU-DPP PKS)

## NARAHUBUNG

0856-4554-6397  
Agus. A. Wahid MG, SPd, M.Sc.  
0822-6062-1141  
Susiaty Puspasari, B.Sc., M.Sc.  
0813-2025-0848  
Iman Sulaiman, Lc.  
0813-8642-7673  
Dr. Suesilowati



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



H. Ahmad Syaikhul  
Presiden PKS

Habib Dr. Salim Segaf Aljufri, MA  
Ketua Majelis Syura PKS



# Anggota FPKS: Basis Data Harus Akurat untuk Dukungan Pengembangan UMKM

“Tidak adanya data terpadu dari kementerian terkait yang akurat dapat menyebabkan upaya pembinaan, pelatihan, dan insentif yang diberikan oleh pemerintah menjadi tertunda dan tidak tepat sasaran

## AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Surabaya (17/11) — Melihat kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang begitu besar bagi perekonomian Indonesia, sudah seharusnya Pemerintah memberikan perhatian yang begitu besar bagi UMKM.

Anggota Komisi VI Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak mengatakan jika engacu pada data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2018 terdapat 64,2 juta pelaku UMKM, yang memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 60,34% dan mampu menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia.

“Melihat kenyataan

tersebut sudah seharusnya Pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar bagi UMKM, lanjut Amin, harus bisa menjadi solusi bagi perekonomian rakyat Indonesia.” ungkap Amin Ak.

Upaya pengembangan UMKM, lanjut Amin, harus didukung dengan adanya data yang akurat, tepat waktu, dan tepat guna.

“Selama ini kita tidak memiliki data yang pasti terkait dengan UMKM, padahal UMKM merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar kepada PDB nasional”, jelas Amin.

“Tidak adanya data terpadu dari kementerian terkait

yang akurat dapat menyebabkan upaya pembinaan, pelatihan, dan insentif yang diberikan oleh pemerintah menjadi tertunda dan tidak tepat sasaran. Itulah mengapa dalam ketentuan perundang-undangan, kami memperjuangkan adanya ketentuan yang mengatur agar data dan informasi UMKM dapat disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna serta dapat mudah diakses oleh masyarakat.” jelas Amin, Ak yang juga anggota Badan Legislasi DPR RI.

Salah satu ketentuan yang telah diperjuangkan Fraksi PKS terkait basis data ini adalah tersedianya basis data tunggal yang bisa di akses masyarakat.

Sekarang ketentuan tersebut masuk di UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat tentang Basis Data Tunggal Pasal 88 ayat (4) sebagai berikut: ‘Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna serta dapat diakses oleh masyarakat.’



Amin, Ak menjelaskan Data yang telah dikumpulkan dan diolah menjadi informasi itu nantinya akan dipublikasikan melalui sistem informasi dan bisa diakses secara *realtime* oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat umum.

“Seluruh informasi terkait jenis usaha dibutuhkan untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang mengalami hambatan sehingga dapat dicarikan solusinya. Selama ini data terkait dengan UMKM berserakan di berbagai Kementerian/ Lembaga, oleh karena itu perlu dipadukan agar dapat membantu Pemerintah dalam pengambilan kebijakan untuk menumbuh dan mengembangkan UMKM,” jelas Amin Ak.

Amin, Ak menambahkan selain itu, untuk mendukung program-program UMKM harus ada sinergi dengan seluruh stakeholder, sehingga produk-produk UMKM dan Ultra Mikro bisa lebih cepat diserap pasar.

“Juga perlu optimalisasi dukungan anggaran yang memadai. Saat ini, anggaran untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM masih dibawah 1 Triliun. Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2021 Rp 978,28 miliar. Anggaran itu akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 352,32 miliar dan program kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebesar Rp 625,96 miliar.” tutup Amin, Ak.

## Soal Rencana Penghapusan Premium

# Aleg PKS Minta Pemerintah Tetap Sediakan BBM Murah Ramah Lingkungan

"PKS menolak program-program Pemerintah yang hanya akan memberatkan rakyat yang tengah menderita, baik secara kesehatan maupun ekonomi. Pemerintah harus peka dengan kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini," tegas Mulyanto.

### Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (16/11) -- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyampaikan kritik dan sarannya kepada Pertamina berkaitan dengan akan dihapuskannya penjualan BBM jenis Premium, Jakarta, Senin (16/11).

Mulai tanggal 01 Januari 2021, rencananya Pertamina akan menghapus penjualan BBM jenis Premium di semua SPBU di Pulau Jawa, Madura dan Bali. Hal ini sebagai tindaklanjut adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20 Tahun 2017, tentang batasan reseach octane number (RON).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Pertamina jangan langsung ambil tindakan sebelum ada revisi Perpres 43 Tahun 2018 yang merupakan Perubahan Perpres 191 Tahun 2014 yang mengatur soal Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).

"Selama Perpres itu belum diubah maka Pertamina wajib menyediakan Premium di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Pulau Jawa, Madura dan Bali," ungkapnya.

Mulyanto menilai Peraturan Menteri KLHK tidak bisa dijadikan landasan hukum

penghapusan pendistribusian premium di Pulau Jawa, Madura dan Bali.

"Pertamina tidak boleh menghapus premium secara semen-mena, karena penghapusan jenis BBM, apalagi yang berupa penugasan Pemerintah, harus berdasarkan keputusan Pemerintah. Jika dilanggar sama juga Pertamina tidak melaksanakan penugasan Pemerintah dengan baik. Pertamina tetap berkewajiban menyediakan BBM penugasan ini untuk masyarakat," kata Mulyanto.

Mulyanto menegaskan PKS mendukung upaya Menteri KLHK mengendalikan pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi bahan bakar. Tapi pelaksanaan Permen itu harus dilakukan secara terintegrasi agar tidak merugikan masyarakat.

Mulyanto mempersiapkan Pemerintah menghapus jenis BBM beroktan rendah tapi harus tetap menyediakan BBM ramah lingkungan dengan harga murah. Jangan sampai masyarakat tidak diberikan alternatif yang memadai.



"Jika memang fokus Pemerintah adalah soal lingkungan maka kebijakan yang perlu diambil adalah mengganti BBM oktan rendah dengan BBM oktan tinggi tapi dengan harga yang tetap terjangkau. Apalagi sekarang harga minyak dunia sedang anjlok. Jika kebijakannya hanya menghilangkan premium tanpa menurunkan harga BBM oktan tinggi, maka motif Pemerintah sudah bukan masalah lingkungan tapi lebih ke masalah ekonomi. Kalau sudah

begini masyarakat yang menjadi korban," jelas Mulyanto.

Mulyanto mendorong Pemerintah dan Pertamina lebih aktif melakukan edukasi berkesinambungan kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat dapat berperan aktif berdasarkan kesadaran sendiri beralih dari BBM oktan rendah ke BBM oktan tinggi yang ramah lingkungan.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



MILAD  
MUHAMMADIYAH  
18 November 1912 - 18 November 2020  
Meneguhkan Gerakan Keagamaan  
Haclapi Pandemi dan Masalah Negeri



# Selamat Milad

## PP MUHAMMADIYAH KE 108



“ Istiqomah dalam berjama'ah  
Mengaktualisasikan keteladanan Rasulullah ﷺ  
menjadi solusi untuk masalah masalah negeri  
berta'awun menghadirkan  
umat islam yang berkemajuan  
rahmatan lil alamin ”

**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

## Sosialisasi UU Haji bersama Kemenag

# Aleg PKS: Kenyamanan Jamaah Haji dan Umrah Diutamakan

UU akan kelihatan celah dan kekurangannya setelah diimplementasikan. Makanya, kita terus kawal implementasi UU ini, sehingga akan kita terus evaluasi pelaksanaannya, bila ada yang kurang pas kita akan segera berikan rekomendasi untuk perbaikan

### **H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Subang (14/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berusaha memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi jamaah.

"Peran kita bersama Pemerintah memastikan penyelenggaraan haji berjalan dengan baik. Sesuai amanah UU, DPR akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi perbaikan. Salah satunya perubahan dari UU Nomor 13 Tahun 2008 menjadi UU Nomor 8 Tahun 2019 ini," terangnya.

Hal tersebut disampaikan pada kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Haji dan Umrah, di Subang, Sabtu (14/11) yang diselenggarakan Kanwil Kemenag Jawa Barat.

"Ada 12 poin penting perubahan dalam revisi UU Haji ini. Semua dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan, perlindungan, pembinaan dan kenyamanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya calon jamaah haji dan umrah", papar



Nurhasan.

Nurhasan juga menegaskan bahwa acara sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat supaya memahami regulasi tentang haji dan umrah secara jelas dan terbuka.

"UU akan kelihatan celah dan kekurangannya setelah diimplementasikan. Makanya, kita terus kawal implementasi UU ini, sehingga akan kita terus

evaluasi pelaksanaannya, bila ada yang kurang pas kita akan segera berikan rekomendasi untuk perbaikan," tambahnya.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Tokoh-tokoh masyarakat, penyuluh agama dan perwakilan calon jamaah haji ini, Nurhasan juga menyarankan kepada para jemaah untuk jeli memilih travel untuk menghindari adanya penipuan. Salah satunya harus

memastikan perizinannya lengkap.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Luar Negeri, Ibadah Haji dan Umrah, Subhan Kholid, MA menjelaskan beberapa point-point perubahan dalam UU ini antara lain masalah pelimpahan porsi, kuota lansia dan pendamping haji, Haji khusus, Pengawasan Haji, dan tata aturan KBIHU.



## Rombak Total UU Kesejahteraan Lanjut Usia

# Nur Azizah Lakukan Kunspek ke Bali

Perlu Undang-undang baru yang mampu merespon perubahan masyarakat, serta mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI setelah tahun 1998

### Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Denpasar (16/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, melakukan Kunjungan Kerja (kunker) Spesifik bersama 8 Delegasi Anggota Komisi VIII DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Kesejahteraan Lanjut Usia ke Denpasar, Bali pada Rabu (11/11/2020).

Kunker dilakukan dalam rangkaian proses perombakan secara total Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia).

RUU tentang perubahan atas UU No. 13 tahun 1998 ini telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan

diusulkan oleh DPR RI sejak 17 Desember 2019.

Menurut Nur Azizah, berdasarkan hasil peninjauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 dinilai sudah tidak lagi relevan saat ini, karena masih menggunakan beberapa definisi lama yakni pada Undang-undang Kesejahteraan Sosial Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

"Perlu Undang-undang baru yang mampu merespon perubahan masyarakat, serta mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum hak asasi

manusia yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI setelah tahun 1998," ungkap Nur Azizah.

Nur Azizah merujuk pada pandangan Komnas HAM terkait hak khusus yang harus menjadi prioritas dalam RUU ini yakni harus mencakup penerapan program 'Healthy Ageing' (menua dengan tetap sehat) sebagai program yang menjadi fokus WHO tentang lansia (2015-2030).

"Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan kesempatan yang bernilai dalam kehidupan. Negara wajib memperhatikan peningkatan kebutuhan populasi yang menua dengan perlakuan khusus, promosi gaya hidup yang sehat, dan lingkungan yang baik dan layak. Serta negara wajib menyediakan akses yang setara bagi lansia terhadap perawatan dan pelayanan kesehatan, meliputi kesehatan fisik, mental dan spiritual", jelas Nur Azizah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Mengenai RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia



dengan Komisi Daerah Lanjut Usia Banten dan Jawa Barat, Panti Pelayanan Sosial DKI Jakarta, Komnas HAM, dan Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLUI) pada (20/9), Sandrayati Moniaga, selaku perwakilan dari Komnas HAM menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 belum secara penuh menjamin hak-hak lansia karena belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak lansia, belum optimalnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam membangun program-program yang terintegrasi, serta belum optimalnya fungsi Komisi Nasional Lansia dan Komisi Daerah Lansia.

Dalam Kunker Spesifik ini, turut dihadiri oleh sembilan Delegasi Panja UU Kesejahteraan Lanjut Usia dari Fraksi Partai Golkar, PDIP, Nasdem, Gerindra, Demokrat dan PKS, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Kepala BPBD Bali, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Komisi Daerah Lanjut Usia Bali, Lembaga Penyandang Disabilitas serta Pengurus Panti Jompo.

Pertemuan ini ditutup dengan penyerahan Plakat Pimpinan Delegasi Komisi VIII, Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si, kepada Kadis Sosial, Pembudayaan Peremuan dan Perlindungan Anak Propinsi Bali.

## Arab Saudi Tutup Pintu Umroh untuk RI,

# Iskan: Tinjau Ulang Regulasi Keberangkatan Jema'ah

Jangan sampai ada istilah ditelantarkan, karena memang sesuai protokol kesehatan, khusus jemaah umroh yang terpapar Covid 19, harus betul-betul kembali dalam keadaan sehat setelah di tes PCR / swab ulang sekembalinya ke tanah air,

## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (17/11) — Pemerintah Arab Saudi menutup sementara waktu untuk proses visa umrah bagi jemaah Indonesia dikarenakan adanya 13 jemaah Indonesia positif terinfeksi Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR/ Swab yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mengatakan penghentian sementara proses visa tersebut oleh Pemerintah Arab Saudi untuk mengevaluasi pengaturan terhadap penyelenggaraan ibadah Umroh.

"Saat ini Pemerintah Arab Saudi sedang menutup proses

visa dalam rangka melakukan evaluasi dan pengaturan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah bagi jema'ah Indonesia, dikarenakan adanya 13 jamaah umroh Indonesia yang positif terpapar Covid -19 di Mekkah. iya, mereka (jemaah umroh) itu yang berangkat pada tanggal 1 dan 3 november yang lalu " paparnya.

Selain itu, 13 orang jemaah umroh asal Indonesia yang positif Covid-19, saat ini sedang dalam penanganan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. mereka akan ditangani dalam protokol kesehatan yang ketat, dan sedang menunggu tes ulang setelah dilakukan

isolasi selama 10 hari.

Walaupun demikian, kata Iskan, muassasah yang bertanggung jawab disana juga harus memperhatikan kebutuhan jemaah umroh yang masih tertahan disana.

"Jangan sampai ada istilah ditelantarkan, karena memang sesuai protokol kesehatan, khusus jemaah umroh yang terpapar Covid 19, harus betul-betul kembali dalam keadaan sehat setelah di tes PCR / swab ulang sekembalinya ke tanah air," ungkapnya.

Iskan juga menambahkan penghentian sementara Visa umroh Indonesia atau dengan kata lain pintu Umroh Saudi sedang ditutup, maka harus ada evaluasi ke depannya.

"Maka dari itu saatnya kita berbenah diri lagi, mana regulasi yang perlu di perbaiki, harus segera dilakukan. sehingga keamanan Jemaah Indonesia yang pra dan pasca umroh tetap terjamin." papar Iskan.

Di lain sisi, Iskan juga menyarankan Pemerintah dalam hal ini Kemenag untuk lebih selektif lagi dalam



menentukan jemaah umroh yang berangkat pada periode berikutnya.

"Selain faktor usia yang sudah ditetapkan (maks 50 tahun), yang paling penting dari sisi riwayat kesehatan, jangan sampai yang bersangkutan punya riwayat kesehatan yang akut, belum lagi Pemerintah tetap harus memberikan kepastian bagi jemaah yang

batal berangkat, ada puluhan ribu jemaah yang sudah membayar, tetapi tertahan keberangkatannya saat ini. kami juga berharap agar calon jemaah Umroh jangan panik. perkembangan akan terus dievaluasi setiap saat ,untuk melindungi tamu Allah dari resiko Covid-19," pungkas Iskan mengakhiri.

## Wacana Vaksinasi Akhir Tahun

# Netty: Jangan Sampai Euforia dan Protokol Kesehatan jadi Ambyar

Jangan sampai masyarakat menolak, bahkan secara sinisme meminta agar para pejabat dan anggota DPR dulu yang diujicoba karena informasi tentang keamanan, efek samping, uji klinis dan kehalalan vaksin tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat

### Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (15/11) — Pemerintah telah meminta otorisasi darurat untuk memulai kampanye vaksinasi massal pada akhir 2020. Jika BPOM menyetujui, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang meluncurkan vaksin Covid-19.

Dalam wawancara dengan media asing, Presiden Joko Widodo mengatakan sudah ada rencana lanjutan untuk mendistribusikan vaksin ke seluruh negeri.

Anggota Komisi IX DPR RI

dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani meminta Pemerintah melakukan proses edukasi publik dengan baik dan jelas agar masyarakat tidak mengalami euforia dan salah paham.

"Vaksinasi tidak berarti bebas Covid-19. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat dan mengantisipasi terjadinya euforia. Jangan sampai kampanye vaksinasi massal membuat penerapan protokol kesehatan jadi ambyar," ujarnya dalam keterangan media,

Minggu, (15/11).

Menurut Netty, protokol kesehatan tetap harus diperketat dan upaya 3T, testing, tracing dan treatment harus terus ditingkatkan.

"Kita tidak ingin karena euforia vaksin maka kebiasaan 3M yang membuat masyarakat hidup lebih sehat, lebih disiplin, lebih patuh dan lebih bersih ditinggalkan. Adalah tugas pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan edukasi publik," tambahnya.

Bukan cuma euforia yang perlu diantisipasi, ujar Netty, tapi juga kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat tentang vaksinasi.

"Jangan sampai masyarakat menolak, bahkan secara sinisme meminta agar para pejabat dan anggota DPR dulu yang diujicoba karena informasi tentang keamanan, efek samping, uji klinis dan kehalalan vaksin tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat," jelasnya.



Selain itu, Netty kembali mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dan transparan dalam menggunakan anggaran penangan Covid-19.

"Anggaran yang digunakan untuk pengadaan vaksin ini adalah anggaran sekaligus amanat rakyat yang harus dikelola secara akuntabel. Pemerintah harus menjelaskan jenis vaksin apa yang dibeli, berapa harganya, dan berapa yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan vaksin," katanya.

Selain itu, katanya lebih lanjut, perlu dijelaskan pada masyarakat, kelompok mana

walau digratiskan, kelompok mana yang harus membayar untuk vaksinasi.

Oleh karena itu, kata politisi PKS ini, anggaran vaksin harus transparan dan dilaporkan secara reguler kepada publik.

"Pengadaan vaksin Covid-19 bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan rakyat dari bahaya pandemi. Jadi perlu dipastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan kesempatan di dalam kesempatan dengan menjadikannya sebagai proyek untuk kepentingan kelompok tertentu," tutup Netty.

## Izin Vaksin Covid BPOM Mundur

# Mufida: Prasyarat Ketat untuk Keselamatan Warga

Pada intinya vaksin tersebut harus berkhasiat, aman dan bermutu demi keselamatan warga. Itu yang jadi pegangan utama. Pada saat ini, jika melihat perkembangan pembuatan vaksin di Indonesia, baik vaksin dari luar negeri seperti sinovac atau dari dalam negeri vaksin merah putih, maka belum memenuhi standar dan prasyarat yang ditentukan untuk EUA

### Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (18/11) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati turut menyoroti tertundanya izin BPOM bagi vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia.

Mufida menerangkan, dasar penerapan dan penggunaan Emergency Use Authorisation (EUA) terhadap vaksin memerlukan prasyarat yang ketat.

"Pertama telah ditetapkan

situasi kedaruratan oleh pemerintah pusat. Kedua, terdapat cukup bukti ilmiah terkait aspek pengamanan, dan khasiat dari obat, untuk mencegah, mendiagnosis, atau mengobati penyakit," ungkapnya.

Ketiga, lanjut Mufida, memiliki mutu yang memenuhi standar yang berlaku serta cara pembuatan obat yang baik. Kemudian, memiliki kemanfaatan lebih besar dibanding risiko

didasarkan pada kajian, data nonkinik obat untuk indikasi yang diajukan. Kelima, belum ada penatalaksanaan yang memadai dan disetujui untuk diagnosis.

"Pada intinya vaksin tersebut harus berkhasiat, aman dan bermutu demi keselamatan warga. Itu yang jadi pegangan utama. Pada saat ini, jika melihat perkembangan pembuatan vaksin di Indonesia, baik vaksin dari luar negeri seperti sinovac atau dari dalam negeri vaksin merah putih, maka belum memenuhi standar dan prasyarat yang ditentukan untuk EUA," terang Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11).

Mufida mencontohkan vaksin Sinovac yang di dalam negeri masih dalam tahap pengujian dan di luar negeri masih memasuki uji klinis tahap 3 dan belum terlihat hasilnya.

"Indonesia memulai uji klinis terlambat satu bulan dibandingkan Chili, Turki, Brazil dan Uni Emirat Arab, dan dari awal sudah diprediksi analisis interim melibatkan 540 subjek mungkin baru bisa Desember



2020. Bahkan analisis lengkap mungkin Maret 2021. Jadi masyarakat justru keaget dengan berita launching vaksin November 2020 oleh pemerintah," terang Doktor alumni Universitas Indonesia ini.

Mufida mengingatkan agar semua pihak terutama pemerintah berbicara berdasarkan perkembangan aktual dan faktual atas pengujian vaksin tersebut. Jangan sampai memberikan angin surga kepada masyarakat tanpa berdasar hasil kajian yang telah ditetapkan.

"Kami percaya bahwa jika data dan hasil pengujian

tersebut telah memenuhi syarat, maka EUA akan dapat dikeluarkan. Jadi, saat ini kita percayakan pada Pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan dan BPOM sebagai garda depan pengujian atas vaksin yang ada," kata Mufida.

"Pemberian vaksin adalah tindakan medis oleh tenaga medis. Jadi ada hubungan dokter dan pasien. Kepercayaan soal efektif tidaknya suatu tindakan medis wajib berdasarkan data uji klinis. Jadi mari kita tidak terburu-buru soal vaksin karena data hasil uji klinis belum utuh," imbuhnya.



**QUOTE**

**H. ECKY  
AWAL  
MUCHARAM**

Anggota Komisi XI DPR RI

*"Kebijakan-kebijakan pemerintah belum fokus kepada inti masalah dari resesi ini. Sebenarnya, inti masalah dari resesi ini adalah covid-19. Artinya, sebenarnya, pemerintah sudah berusaha menyelesaikan masalah covid-19 ini. Akan tetapi disisi lain, publik melihat bahwa masih sangat lambat penanganan masalah serta dampak-dampaknya.*



## Hadapi Resesi

# Aleg FPKS: Program Pemerintah Harus Dipastikan Efektif dan Efisien

Pergerakan ekonomi ini tidak cukup untuk menangani atau meningkatkan konsumsi pada desil I, II, III, IV, tetapi juga harus bagaimana menggerakkan perekonomian ada demand seat dari kelompok menengah yang jumlahnya cukup besar

### **H. ECKY AWAL MUCHARAM**

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (13/11) – Anggota Komisi XI DPR RI, H. Ecky Awal Muharam, memberikan kritik dan sarannya untuk pemerintah dalam menghadapi resesi.

Hal ini disampaikan Ecky pada acara PKS Legislatif Corner dengan tema Fixed, Indonesia Resesi, Jakarta, Jumat (13/11/2020).

Ecky menyatakan, bahwa apabila masalah covid-19 tidak segera diselesaikan atau melandai penanganannya, otomatis dari segi supply side dan demand side dari

perekonomian Indonesia tidak akan ada growth (pertumbuhan).

"Pemerintah juga harus berani mengkoreksi kebijakan-kebijakan fiskal dan kebijakan moneternya," tambah Ecky.

Artinya, uang yang beredar jangan hanya dikalangan elit saja, DPK naik 12%, oleh perbankan dan instrumen bukan menjadi pembiayaan supaya bisa menumbuhkan sektor yang lain.

"Harus ada kebijakan, ada transmisi dari DPK tersebut

yang bisa mendrive pertumbuhan kredit, pinjaman pembiayaan, yang akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas Ecky.

Ia juga menjelaskan, bahwa program pemerintah mengeluarkan uang ratusan triliun untuk membagikan kepada rakyat semacam BLT, PKH, sembako murah dsb itu bagus untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Akan tetapi, hal tersebut hanya untuk konsumsi pada desil I, II, III, dan IV yaitu orang-orang 40%



terbawah dari sisi kemampuan ekonominya.

"Pergerakan ekonomi ini tidak cukup untuk menangani atau meningkatkan konsumsi pada desil I, II, III, IV, tetapi juga harus bagaimana menggerakkan perekonomian ada demand seat dari kelompok menengah yang jumlahnya cukup besar. Nah, insentif-insentif ini harus dievaluasi apakah benar policy fiskal kita sudah bisa mendrive pertumbuhan ekonomi," jelas Ecky.

Dilain sisi, Ecky juga menambahkan, bahwa dalam satu bulan menjelang tutup buku masih ada total APBD yang belum dibelanjakan

seluruh Indonesia sebanyak 500 triliun, waktu tersebut tinggal satu bulan lagi.

Kemudian, terdapat juga anggaran pemerintah pusat yang belum dibelanjakan sebanyak 700 triliun.

Artinya serapan anggaran untuk mendorong pertumbuhan, belanja pemerintah sebagai motor pergerakan pertumbuhan tersendat dikarenakan serapannya rendah.

Ecky berharap, dalam satu bulan terakhir ini, pemerintah daerah dan pusat harus menggenjot pengeluaran secara efektif dan efisien agar tepat sasaran.

# Aleg PKS Desak Pemerintah Antisipasi Secara Serius Lonjakan Angka Pengangguran

Harus ada upaya yang serius untuk atasi hal ini, perlu ada program yang tepat demi menekan angka pengangguran yang terus meningkat

## Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Lampung (14/11) — Pandemi covid-19 masih terus berlanjut dan belum memberikan sinyal membaik. Saat ini masyarakat tidak hanya mengalami krisis kesehatan melainkan juga krisis ekonomi yang membuat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran terus mengalami lonjakan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan bahwa jumlah pengangguran per Agustus 2020 mengalami lonjakan sebanyak 2,67 juta orang atas dampak pandemi Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Junaidi Auly selaku Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk mengantisipasi lebih serius atas meningkatnya pengangguran.

"Harus ada upaya yang

serius untuk atasi hal ini, perlu ada program yang tepat demi menekan angka pengangguran yang terus meningkat," ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Sabtu (14/11)

Legislator Fraksi PKS ini mengatakan saat ini Indonesia mengalami resesi ekonomi, dan diantara dampak yang mungkin timbul dari terjadinya resesi ini yaitu semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan permintaan masyarakat yang menurun sehingga banyak unit usaha yang beroperasi terganggu dan akhirnya terjadilah PHK.

Sebelumnya, BPS mencatat jumlah pengangguran semakin bertambah akibat Covid-19. Naik 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang pada kuartal III/2020. Rinciannya

terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen penduduk usia kerja), terdiri dari pengangguran karena Covid-19 2,56 juta orang. Bukan Angkatan Kerja (BAK) 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid 1,77 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid sebanyak 24,03 juta orang.

Junaidi menegaskan kepada pemerintah agar hadir dalam membantu masyarakat yang terkena dampak PHK atau Covid-19 melalui program-program yang menambah keterampilan berusaha. Tidak sedikit masyarakat yang menginginkan program tersebut karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya.

"Selain itu pemerintah juga diharapkan membantu masyarakat dalam aspek permodalan, bantuan sarana prasarana, inovasi produk dan pemasaran." pungkasnya.



## Pemerintah Kucurkan 20 T Untuk Jiwarsaya

# Anis: Pengalihan Tanggungjawab pada Rakyat Indonesia

“Dalam kasus Jiwarsaya, kita tahu adanya indikasi kuat korupsi, organized crime dan fraud. Sehingga ‘perampokan’ Jiwarsaya harus diproses secara hukum dan pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah. Kasusnya harus dibuka

### Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (16/11) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan beberapa catatan terkait pemberian PMN kepada beberapa BUMN, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direksi Penerimaan Penyertaan Modal Negara (DPMN), Senin (16/11/2020).

Rapat tersebut, membahas tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2020 dan

2021 kepada BUMN.

“Kenaikannya sebesar 98% dari yang telah disepakati bersama DPR. Sehingga secara total pemerintah menyediakan dana yang sangat besar untuk BUMN yaitu sebesar Rp 151,1 Triliun atau sekitar 20% lebih dari dana PEN. Dengan beragam skenario. Sebanyak Rp 115,95 Triliun pencairan utang pemerintah, Rp 11,5 Triliun dana talangan, dan PMN sebanyak Rp 23,65 Triliun. Bagaimana penjelasan untuk

poi ini ?” tanya Anis.

Catatan pertama yang disampaikan Anis, terkait kenaikan PMN dalam pos investasi di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 sebesar Rp 37,4 Triliun kepada 8 BUMN. Dan pada APBN 2021 menjadi Rp 42,38 Triliun atau naik 13% dari acuan awal.

Diantara BUMN yang mendapatkan kenaikan kucuran PMN ini adalah PT Utama Karya, yang mendapatkan PMN dari sebesar Rp 3 Triliun dalam RAPBN 2021 menjadi Rp 11 Triliun dalam APBN 2021 yang diberikan dalam dua tahap.

“Sebenarnya masih bisa dianggarkan untuk tahun depan. PMN untuk PT Utama Karya ini tidak harus diberikan pada saat situasi Indonesia sangat membutuhkan pemulihan ekonomi. Apalagi pembangunan jalan tol ini bukan termasuk dalam kategori padat karya yang menyerap



banyak tenaga kerja, karena pelaksanaannya lebih banyak menggunakan mesin dengan alat berat dibandingkan dengan tenaga manusia,” jelas Anis.

Menurut Anis yang juga Doktor Ekonomi Islam Lulusan Universitas Airlangga, secara prioritas dan logika akal sehat dana ini akan digunakan untuk pembangunan tol yang di saat pandemi ini sebaiknya dipertimbangkan agar ditunda. “Realitanya selama ini tidak tepat sasaran,” ungkap Anis.

Anis juga memberikan catatan agar kenaikan PMN harus diberikan tepat sasaran, yaitu kepada BUMN yang tidak berpotensi memiliki risiko fiskal yang kelak akan menjadi beban keuangan negara.

Hal ini dilihat berdasarkan

data setoran pendapatan yang terus menurun. Indikatornya dapat terpantau dari rendahnya setoran hasil kekayaan negara dipisahkan (KND) yang masuk ke pos Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).

Pada tahun 2020 BUMN hanya mampu menyeter Rp 65 triliun sedangkan tahun 2019 penerimaan PNBP dari KND mencapai Rp 80,72 triliun yang berarti mengalami penyusutan 19,6%. Begitu untuk tahun 2021, Pemerintah kembali memangkas prediksi PNBP dari KND menjadi Rp 26,13 triliun. Dan dividen yang diberikan BUMN sendiri tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan Negara.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# ***Mari Tetap Patuhi Protokol Kesehatan***

# Anggota Baleg FPKS Minta RUU HIP Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2021

RUU HIP ini sudah semestinya didrop mengingat reaksi penolakan masyarakat yang begitu masif. DPR harus peka dengan aspirasi ini. Jika RUU HIP dimasukan lagi ke dalam prolegnas prioritas sama saja kita mengundang kegaduhan baru di negeri ini

## **Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (18/11) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Mulyanto, meminta pimpinan Badan Legislatif DPR tidak memasukan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ke dalam Program Legislasi Nasional 2021.

"Fraksi PKS meminta kepada pimpinan Baleg DPR RI, agar RUU HIP tidak dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas prioritas tahun 2021," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto.

Usulan tersebut

disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja Prolegnas DPR yang dilakukan Selasa (18/11). Mulyanto mengatakan seharusnya ada kriteria bagi suatu RUU untuk bisa masuk prolegnas prioritas tahunan.

Selain sudah siapnya draft dan naskah akademik, kata dia, RUU yang diprioritaskan haruslah ada kebutuhan mendesak atas aturan itu.

Menurut PKS, kata dia, RUU HIP mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat. Bahkan, pemerintah juga tidak menerbitkan surat presiden, serta DIM atas RUU itu.

"RUU HIP ini sudah semestinya didrop mengingat reaksi penolakan masyarakat yang begitu masif. DPR harus peka dengan aspirasi ini. Jika RUU HIP dimasukan lagi ke dalam prolegnas prioritas sama saja kita mengundang kegaduhan baru di negeri ini," lanjut Mulyanto.

"Karenanya sudah selayaknya RUU HIP ini dikeluarkan dari Prolegnas prioritas tahun 2021. Ini penting, agar berbagai program perundangan yang diajukan Baleg di tahun 2021 ini dapat terealisasi," kata dia.





# Aleg PKS: Institusi Keluarga Perlu Diperkuat untuk Mendukung Kemajuan Bangsa

“Banyak sekali harapan-harapan dan tugas yang diberikan kepada keluarga (oleh negara dalam mendukung program nasional). Oleh sebab itu, kita ingin negara hadir untuk memperkuat keluarga-keluarga di Indonesia untuk mampu menjalankan perannya. Jika kita ingin memperkuat bangsa ini, tentu kita pun harus memperkuat institusi keluarga”

## Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesra / Pengusul RUU KK

Jakarta (16/11) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Netty Prasetyani menyatakan bahwa RUU Ketahanan Keluarga diperlukan untuk memperkuat peran keluarga dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara. Hal ini disampaikannya di Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam agenda harmonisasi RUU Ketahanan Keluarga, di

Senayan, Senin (16/11).

“Banyak sekali harapan-harapan dan tugas yang diberikan kepada keluarga (oleh negara dalam mendukung program nasional). Oleh sebab itu, kita ingin negara hadir untuk memperkuat keluarga-keluarga di Indonesia untuk mampu menjalankan perannya. Jika kita ingin memperkuat bangsa ini, tentu kita pun harus memperkuat institusi keluarga”,

ungkap Netty dalam paparannya.

Menurutnya, keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat telah sejak lama menjadi ujung tombak bagi negara untuk menjalankan setiap program yang ada.

“Selama ini, sadar ataupun tidak sadar, kita melihat bahwa negara banyak mengandalkan keluarga untuk melakukan banyak hal, seperti urusan stunting, dan pengasuhan, asupan gizi, sekaligus pembangunan karakter, moral dan akhlak. Untuk isu-isu tersebut, negara mengandalkan keluarga. Dalam konteks ini, maka negara memiliki ketahanan dalam dukungan, penguatan, pengokohan agar keluarga memiliki ketahanan dalam menghadapi beragam situasi”, jelas Anggota DPR dari Komisi IX ini.

Selain itu, lanjut Netty, RUU Ketahanan Keluarga diperlukan karena program pembangunan yang ada saat ini masih belum komprehensif,



khususnya dalam melibatkan institusi keluarga.

“Kita melihat, bahwa banyak program pembangunan yang penekanannya baru pada individu dan bersifat personal, seperti untuk anak-anak, pemuda, ataupun perempuan. Padahal ada institusi yang sangat menentukan kemajuan, kebaikan, dan kesejahteraan bangsa ini yang bernama keluarga. RUU Ketahanan Keluarga adalah lex specialis dari UU yang selama ini sudah membahas keluarga. Mengingat, UU yang ada belum menjelaskan secara rinci bagaimana keluarga ini harus dikokohkan untuk memiliki ketahanan dalam menghadapi beragam situasi”, ujar Netty.

Ia pun menepis sejumlah

isu miring yang beredar di masyarakat terhadap RUU ini, seperti kekhawatiran akan melakukan homogenisasi keluarga di Indonesia.

“Kita tidak ingin menyeragamkan, tidak ingin homogenisasi terhadap keluarga di Indonesia, justru ingin setiap keluarga akan mampu tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan keragamannya, sehingga bisa berkontribusi sesuai potensi dan kemampuan yang ada. Jadi, InsyaAllah, jika kita melihatnya dengan sebuah kelapangan dada, maka tidak ada pasal-pasal atau ayat yang mengatur secara privat apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman anggota”, pungkasnya.

## Menjawab Sejumlah Kritik

# Aleg PKS: Sandingkan Saja RUU Ketahanan Keluarga dan UU Eksisting

Apabila kita lihat UU No. 52 Tahun 2009, UU ini cenderung hanya berfokus pada kuantitas, itu titik tekannya, bukan pada kualitas. Lalu, nomenklatur ketahanan keluarga di UU lama memang sudah ada, tapi tidak dibahas secara rinci

**Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.**

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (17/11) – Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Al-Muzammil Yusuf, mengusulkan agar RUU Ketahanan untuk disandingkan dengan UU Eksisting agar pembahasan menjadi lebih komprehensif.

Hal ini dinyatakannya sebagai respons atas komentar dari sejumlah anggota DPR yang masih mempertanyakan urgensi RUU tersebut dalam proses pembahasan di Baleg.

"Saya pikir untuk pembahasan dan pendalaman selanjutnya, kita sandingkan saja antara RUU Ketahanan Keluarga dan UU eksisting, yakni UU No. 52 Tahun 2009

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga", ujar AlMuzammil di Senayan, Senin (16/11) kemarin.

Menurutnya, jika sudah disandingkan, maka akan terlihat dengan jelas perbedaannya.

"Apabila kita lihat UU No. 52 Tahun 2009, UU ini cenderung hanya berfokus pada kuantitas, itu titik tekannya, bukan pada kualitas. Lalu, nomenklatur ketahanan keluarga di UU lama memang sudah ada, tapi tidak dibahas secara rinci", ujar Anggota DPR dari Dapil Lampung ini.

Oleh sebab itu, lanjut Al-

Muzammil, apabila ketentuan yang ada dalam RUU Ketahanan Keluarga belum dimuat dalam UU sebelumnya, maka itu sudah bisa menjadi dasar yang kuat untuk membuat RUU ini.

"Kita sandingkan saja secara objektif. Jika memang belum diatur, maka saya kira, kami (Fraksi PKS) akan setuju (terhadap RUU Ketahanan Keluarga)", ungkapnya.

Muzammil pun mengingatkan pentingnya aturan hukum yang membahas keluarga dan mendorong pemerintah untuk memperkuat keluarga.

"Jumlah keluarga di Indonesia itu mencapai puluhan juta. Inilah urgensi kita dalam bahasan ini. Jika dirasa RUU ini terlalu menginfiltrasi (ranah privat), kita lihat, di pasal mana itu disebutkan? Saya kira ini lebih pada mendorong fasilitasi pemerintah terhadap ranah keluarga yang kita ingin kekokohan itu bersumber dari (institusi) masyarakat terkecil", pungkas Muzzamili.






## PENDAPAT MINI

### FRAKSI PKS DPR RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETAHANAN KELUARGA (RUU KK)

- 1 Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU KK diperlukan sebagai payung hukum dalam mengatur mengenai Ketahanan Keluarga, hal ini dikarenakan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai keluarga yang berlaku saat ini masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.
- 2 Fraksi PKS mendukung hadirnya RUU KK sebagai *lex specialis*, yang mengatur Ketahanan Keluarga secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri secara komprehensif sehingga dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi Keluarga.
- 3 Fraksi PKS berpendapat bahwa kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Keluarga merupakan hal yang penting dan mendesak untuk mengembalikan dan menguatkan fungsi keluarga dalam kebijakan Ketahanan Keluarga yang bersifat hulu dan mampu berpihak pada kepentingan Keluarga dan memberikan perlindungan kepada Keluarga.
- 4 Fraksi PKS berpendapat RUU KK mendorong Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga sebagai strategi yang mengintegrasikan perspektif Ketahanan Keluarga secara rasional dan sistematis pada setiap tahap dan siklus pembangunan.
- 5 Fraksi PKS berpendapat kehadiran klausul Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga (RI-PKK) sebagai pedoman Pembangunan Ketahanan Keluarga yang menjadi acuan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional patut diapresiasi dan didukung bersama, sehingga ke depan dapat tercipta sinergisitas kebijakan Ketahanan Keluarga antara kementerian/lembaga di pemerintah pusat, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, juga tercipta kesinergian gerak antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mencegah dan menangani kerentanan keluarga. Karena pembangunan nasional



akan optimal jika dilaksanakan dengan kesesuaian, sinergisitas, dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

- 6 Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU KK mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan kebijakan pengembangan lingkungan ramah Keluarga yang meliputi pekerjaan ramah Keluarga dan wilayah ramah Keluarga.
- 7 Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU KK telah mengatur perlindungan keluarga secara komprehensif. Pelindungan Ketahanan Keluarga meliputi perlindungan eksistensi Keluarga, perlindungan legalitas Keluarga, perlindungan Keluarga dari kerentanan.
- 8 Fraksi PKS berpendapat RUU KK mendorong terselenggaranya sistem informasi Ketahanan Keluarga secara terintegrasi.
- 9 Fraksi PKS berpendapat bahwa klausul Pendidikan Ketahanan Keluarga dalam RUU KK menguatkan fungsi dan peran keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak, sebagaimana amanat Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pendidikan informal yang sangat kuat memberikan peran pendidikan pada keluarga maupun lingkungan sekitar.

Berdasarkan pandangan di atas, dengan memohon taufik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 02 Rabiul Akhir 1442 H / 18 November 2020 M

# Wakil Ketua BURT: Memasuki Era Industri 4.0, DPR Harus Wujudkan Digitalisasi

Memasuki era 4.0 DPR RI harus melakukan digitalisasi. Ke depan semua harus serba digital, paperless. Kurangi kertas, dokumen menggunakan digital

**DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH**

Wakil Ketua BURT DPR RI

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah mengungkapkan, memasuki era industri 4.0, DPR RI harus segera mewujudkan digitalisasi dokumen dan mengusung konsep paperless. Yakni dokumen-dokumen dan data-data yang memungkinkan untuk dibuat digital akan dikonversi ke dalam bentuk digital file dan disimpan ke dalam digital storage.

Mengusung konsep paperless merupakan sebuah langkah di era digital, gagasan e-parlemen meniscayakan

dalam penggunaan file digital untuk menyimpan dokumen. "Memasuki era 4.0 DPR RI harus melakukan digitalisasi. Ke depan semua harus serba digital, paperless. Kurangi kertas, dokumen menggunakan digital," ujar Dimiyati saat acara Pelatihan Kepemimpinan dalam Pengelolaan Anggaran, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2020).

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, gagasan tentang paperless harus segera diwujudkan, menurutnya ini

salah satu konsep dari turunan parlemen modern, sehingga penggunaan digital akan dimasifkan, agar mengurangi penggunaan kertas.

Karena penggunaan kertas yang berlebihan bisa mendatangkan banyak efek buruk, sehingga mendorong banyak institusi untuk go-digital. "Semua aspek bekerja harus disederhanakan, cara digital yang paling mungkin untuk mengefektifkan pekerjaan. Konsep parlemen modern, kita berharap di awal tahun depan bisa mulai terlihat," papar Indra. (eko/es)



# Syaikhu Minta Pemerintah Tak Cabut Subsidi dan Stimulus kepada UMKM

“Ada kekhawatiran dari para pelaku UMKM terkait dengan berakhirnya masa pemberian bantuan ini pada akhir tahun 2020, sementara para pelaku UMKM belum bisa survive

## H. AHMAD SYAIKHU

Wakil Ketua BAKN DPR RI

Jakarta (20/11) — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu, meminta pemerintah untuk tidak mencabut bantuan subsidi dan stimulus kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil DAN Menengah (UMKM).

Hal itu disampaikan Syaikhu usai memimpin rapat BAKN dan Pemerintah Provinsi Bali. Ini merupakan rangkaian kegiatan lawatan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Bali dalam rangka menelaah pengelolaan subsidi energi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Selasa (17/11/2020).

“Saya meminta agar pemerintah tidak mencabut subsidi dan bantuan kepada

UMKM,” kata Syaikhu. Permintaan Syaikhu ini karena mencermati adanya kekhawatiran dari masyarakat terhadap pencabutan subsidi. Ini karena akan berakhirnya masa pemberian bantuan (subsidi dan stimulus) di akhir tahun 2020. Ia mengaku akan menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tidak mencabut bantuan subsidi dan stimulus.

“Ada kekhawatiran dari para pelaku UMKM terkait dengan berakhirnya masa pemberian bantuan ini pada akhir tahun 2020, sementara para pelaku UMKM belum bisa survive,” jelas Syaikhu.

Bali menjadi salah satu daerah yang terdampak besar akibat pandemi Covid-19.



Wakil Ketua BAKN Ahmad Syaikhu bersama Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Bali dalam rangka menelaah pengelolaan subsidi energi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Selasa (17/11/2020).

Dilaporkan, pertumbuhan ekonomi berada pada kondisi minus hampir 14 persen.

Anggota Komisi V DPR RI yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyampaikan bahwa pada angka pertumbuhan ekonomi tersebut, telah mempengaruhi

kondisi para pelaku UMKM di Bali yang dinilai sangat sulit mengembangkan usaha agar bisa bertahan.

“Oleh karena itulah harus ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemda sudah menyalurkan Rp 48

miliar untuk UMKM, nah pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan bantuan-bantuan termasuk subsidi energi,” tegas legislator dari Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta itu.



# *Senyum Petani, Kebahagiaan Kami*



Siang ini (13/11), Kami bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Bapak Muqodam meninjau langsung proses distribusi bantuan paket konverter kit untuk para petani sasaran di UPT Perbenihan Dinas Pertanian Purbalingga.

Bantuan ini berbentuk konverter kit, pompa air, tabung lpg 3 kg dan isi.

Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang hari ini tetap bertahan di tengah kondisi pandemi virus corona.

Para petani membutuhkan bahwa dengan kondisi yang sulit, mereka tetap mampu menjadi pahlawan dalam menjaga ketahanan pangan bangsa.

Bahagia sekali hari ini kami melihat para petani dapat tersenyum, saat menerima bantuan ini.

Tentu bantuan ini tidak seberapa, diharapkan dengan bantuan ini para petani sedikit terbantu khususnya dalam menghadapi musim kemarau panjang / kesulitan pengairan.

Kami bersama Dinas Pertanian Purbalingga akan berupaya agar tahun berikutnya, semakin banyak petani yang mendapatkan bantuan ini.

Maju Terus Petani Indonesia.



# Nevi Zuairina Buka Pameran UMKM untuk Meriahkan MTQ Nasional di Sumbar

harus ada peningkatkan. Dan pelaku-pelaku UMKM Baru perlu muncul untuk mengisi kekosongan pada usaha yang telah naik tingkat. Inilah rantai pembinaan dan pengkaderan pada sektor UMKM yang terus perlu ditumbuhkan

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

Padang (15/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina membuka pameran UMKM dalam rangka memeriahkan MTQ Nasional ke XXVIII di Padang.

Perhatian Anggota Komisi VI DPR ini selalu tercurah pada pelaku usaha UMKM, karena tidak dipungkiri usaha pada cluster ini merupakan penggerak utama perekonomian nasional yang sedapat mungkin diupayakan agar tidak terganggu.

Mengutip data dari BPS, Nevi mengungkapkan bahwa jumlah Usaha Mikro Kecil dan

Menengah menjapai 64 Juta pelaku usaha. Angka tersebut sangat mendominasi pelaku usaha yang beroperasi di Indonesia.

"Selama pandemi corona, sektor UMKM paling terdampak. Banyak pengusaha UMKM yang telah gulung tikar. Terdapat 30 persen yang usahanya terganggu. Sedangkan yang berusaha menemukan jalan sekitar 50 hingga 70 persen. Kita semua harus berupaya saling membantu dan memberikan kontribusi untuk menyelamatkan pelaku usaha UMKM",

kata Nevi dalam pidatonya.

Nevi juga ketua Dekranasda Sumatera Barat ini mengungkapkan keterangan dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa selama pandemi ini penjualan di e-commerce naik hingga 26 persen, atau 3,1 juta transaksi per hari.

Melihat fenomena ini, Nevi mengajak pada pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan perpindahan pola usaha menggunakan platform digital agar segera di galakkan.

"Karena perilaku konsumen dan metode-metode dalam transaksi perniagaan akan secara cepat berubah dengan dominasi pola digitalisasi semua sistem mulai dari manajemen, hingga keuangan", ungkap Nevi.

Dengan menggandeng beberapa BUMN dan pemerintah pusat, Politisi PKS ini terus mengupayakan program-program peningkatan skill sdm maupun peningkatan sistem manajemen perusahaan level UMKM agar lambat laun beru-



bah menjadi perusahaan level menengah hingga besar. Sehingga Pelaku UMKM ini tidak selamanya berada di cluster ini.

"Harus ada kenaikan kelas atau kenaikan tingkat pada skala usaha di pelaku UMKM. Jangan mau terus di sektor UMKM, harus ada peningkatan. Dan pelaku-pelaku UMKM Baru perlu muncul untuk mengisi kekosongan pada usaha yang telah naik tingkat. Inilah rantai pembinaan dan pengkaderan pada sektor UMKM yang terus perlu ditumbuhkan", ucap Nevi.

Legislator asal Sumatera II ini pada kesempatan bertemu dengan para pelaku UMKM di

BIM (Bandara Internasional Minangkabau) mengemukakan lima strategi pemasaran efektif yang dapat dilakukan pelaku UMKM. Diantaranya adalah (1) Menciptakan Produk Unik, (2) Membuat tujuan iklan yang jelas, (3) Melakukan Online Marketing, (4) Membuat Promo Menarik, dan (5) Selalu Konsisten.

Nevi juga mengajak berbagai elemen usaha besar untuk berpartisipasi dalam pameran UMKM ini. Salah satunya PT Angkasas Pura II cabang BIM.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*



# Aleg PKS Perjuangkan Masyarakat Lansia Indonesia agar Hidup Berdaya dan Sejahtera

Masyarakat lansia secara umum masih belum mendapatkan prioritas khususnya saat harus menggunakan transportasi umum. Karenanya, fasilitas umum ramah lansia harus menjadi perhatian khusus dalam komponen RUU KLU

**Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A menjadi Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia (RUU KLU). Dalam menjalankan tugasnya sebagai Panja Nur Azizah banyak menyerap aspirasi dari para penggiat, pakar dan aktivis masyarakat Lansia. Nur Azizah melakukan diskusi khusus pada Ahad (15/11) bersama Ida Murni, salah satu Aktivis Lansia sekaligus pembina Lansia di PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat) Kota Depok. Diskusi berlangsung hangat di kediaman Ida Murni di Kawasan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok.

Berdasarkan hasil diskusi Panjang Bersama Ida Murni, Nur Azizah mendapatkan bahwa masyarakat lansia secara umum masih belum mendapatkan prioritas khususnya saat harus menggunakan transportasi umum. Karenanya, Nur Azizah tegaskan bahwa fasilitas umum ramah lansia harus menjadi perhatian khusus dalam komponen RUU KLU. Menurut Ida Murni, meskipun di beberapa moda transportasi umum seperti Trans Jakarta dan Commuter Line sudah ada aturan khusus bagi lansia agar mendapatkan kursi prioritas, tapi hal itu tidak dibarengi dengan perlakuan prioritas yang juga harus diterima oleh masyarakat lansia.

“Seperti yang baru saja di alami teman saya di Stasiun UI. Saat akan naik KRL dia sempat terseret kereta karena pintu kereta yang terbuka dan tertutup secara otomatis begitu cepat menjadi kesulitan tersendiri bagi lansia, selain itu juga tidak ada pemberitahuan apa pun dari masinisnya, juga tidak adanya petugas yang menjaga di tiap pintu kereta untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Kondisi seperti itu sangat menyulitkan bagi lansia untuk naik KRL, meskipun saat di dalam kereta mereka mendapatkan kursi prioritas”, jelas Ida.

Selain itu, Ida Murni juga menceritakan bahwa moda transportasi Angkutan Umum Perkotaan (Angkot) masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri baik bagi lansia maupun pemerintah daerah. Belum ada aturan tegas bagi moda transportasi angkot untuk memprioritaskan penumpang lansia. Masih banyak lansia yang mengandalkan moda transportasi Angkot untuk beraktivitas dan merasa kesulitan karena kerap diperlakukan tidak nyaman oleh supir Angkot. “Kasus lainnya ada lansia yang terseret karena saat akan naik



angkot, satu kaki masih posisinya di bawah, tapi angkot sudah jalan. Perlu ada koordinasi lagi bagi seluruh pengemudi angkot dan transportasi umum lainnya agar memberikan fasilitas prioritas bagi lansia. Dan memperlakukan masyarakat lansia dengan baik”, terang Ida Murni.

Selain masalah transportasi, fasilitas umum seperti layanan kesehatan serta layanan antrian Bank masih minim yang memprioritaskan masyarakat lansia. Di Bank,

Lansia yang kondisi ketahanan dan fisiknya sudah menurun masih harus ikut mengantri panjang bersama nasabahnya umum lainnya. Jika merujuk pada aturan ramah lansia harusnya lansia menjadi kelompok prioritas dan memiliki antrian khusus bagi mereka. Begitu pun saat harus mendapatkan fasilitas kesehatan, masalah antrian khusus lansia masih belum menjadi prioritas.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](https://fraksi.pks.id)

Terima Aspirasi Guru Honorer

# Teddy: Kita Minta Road Map Penyelesaian Honorer Sampai 2023

Kita akan minta road map penyelesaian masalah honorer ini pada pemerintah. Kita berharap 2023 semua selesai. Kalo 2024 sudah pasti sibuk tahun politik. Nah kita coba minta tahun 2021 berapa yang bisa diselesaikan kemudian tahun 2022 berapa yang selesai sampai tahun 2023 agar jelas tahapan-tahapannya

**TEDDY SETIADI, S.Sos.**

Anggota Komisi II DPR RI

Bandung (17/11) — Anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi PKS Teddy Setiadi, menerima perwakilan Forum Guru Honorer Jawa Barat Jumat 13 November 2020 di Bandung

Dalam penyampaian aspirasinya Dwi Sulastri sebagai ketua forum menyampaikan bahwa anggota yang terkumpul dalam Forum Guru Honorer Jawa Barat ini adalah Guru Honorer yang tidak lulus passing grade pada saat tes pengangkatan K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada

tahun 2019 yang jumlahnya 148 Orang di Jawa Barat.

"Kuota pengangkatan PPPK di Jawa Barat 1500 Orang, Yang mendaftar dan ikut tes 935 Orang, lulus tes 695 Orang, tidak lulus 148 Orang" ujar Dwi.

Kami sudah beberapa kali bertemu dengan Anggota DPRD Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, BKN, sampai KemenPanRB tetapi masih belum ada hasil padahal di setiap pertemuan selalu ada kabar yg menggembirakan

namun setelahnya nasib kami terkatung-katung kembali." Tutur Dwi

Alhamdulillah sejak Gubernur Ahmad Heryawan honor kami meningkat menjadi Rp 2.040.000 yang tadinya hanya 400.000 bahkan ada yang 200.000. Sekarang kami hanya ingin dihargai. Saya sudah 26 tahun mengabdikan menjadi guru, rekan-rekan saya juga ada yang 25 tahun, 20 tahun, paling sedikit 17 tahun mengabdikan. Kami sudah tua kami hanya ingin dihargai." Jelas Dwi sambil meneteskan air mata.

Menanggapi hal tersebut Teddy menjelaskan bahwa sudah seharusnya Pemerintah memberi penghargaan untuk guru-guru honorer yang tidak perlu diragukan lagi pengabdian dan keikhlasannya.

Teddy siap melanjutkan aspirasi dari para guru honorer salah satunya dengan mendorong pemerintah agar memberikan kejelasan road map penyelesaian K2 termasuk guru honorer di dalamnya.

"K2 yang lulus tes menjadi PPPK juga nasibnya masih



terkatung katung, setelah kita terus desak setiap rapat untuk penyelesaian honorer ini Alhamdulillah terbit Perpres no 98/2020 terkait gaji dan tunjangan PPPK." Tutur Teddy

"Kita akan minta road map penyelesaian masalah honorer ini pada pemerintah. Kita berharap 2023 semua selesai. Kalo 2024 sudah pasti sibuk tahun politik. Nah kita coba minta tahun 2021 berapa yang bisa diselesaikan kemudian tahun 2022 berapa yang selesai sampai tahun 2023

agar jelas tahapan-tahapannya. Yang kita terus dorong bukan hanya untuk honorer K2 Jawa Barat saja tetapi masih ada sekitar 300.000 honorer K2 dalam database BKN juga yang yang harus diselesaikan." Pungkas Teddy

Dalam kesempatan tersebut Teddy pun memberikan apresiasi kepada perwakilan guru honorer sekaligus secara simbolis menerima surat aspirasi untuk dilanjutkan dibahas dalam rapat dengan pemerintah.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# Sukseskan



**MUNAS**  **PKS**  
Musyawarah Nasional V PKS  
Bandung, 26-29 November 2020

*Bersama Melayani  
Rakyat*

#PKSPelayanRakyat

*Dr. H. Jazuli Juwaini, MA*  
Ketua Fraksi PKS DPR RI



# Netty Ajak Masyarakat Indramayu Kokohkan Jiwa Nasionalisme dan Solidaritas di Masa Pilkada

"Nilai-nilai empat pilar, seperti jiwa nasionalisme dan solidaritas, harus disosialisasikan pada masyarakat agar wujud dalam keseharian. Kita tidak ingin nilai-nilai ini hanya menjadi simbol yang tidak bermakna,

## Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

Indramayu (18/11) — Masyarakat Indramayu akan menghadapi pilkada pada 9 Desember 2020. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani mengajak masyarakat Indramayu untuk mengokohkan jiwa nasionalisme dan solidaritas.

"Dalam waktu dekat, Indramayu akan menghadapi pilkada serentak 2020. Berdasarkan pengalaman, proses pemilihan kepala daerah menjadi salah satu kegiatan yang berpotensi memecah belah masyarakat akibat perbedaan dukungan pasion. Pembekalan diharapkan membuat masyarakat lebih waspada dan bijaksana dalam mengelola perbedaan dukungan. Jangan

sampai persatuan dan ketentraman di masyarakat terkoyak," ungkap Netty dalam acara yang digelar di aula RM Sambel Lada, Haurgeulis Indramayu, Rabu, (18/11).

Dalam kegiatan tersebut, tokoh perempuan Jawa Barat ini berpesan bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI dan semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan warisan para pendiri bangsa yang harus terus dipelihara dan dijaga bersama.

"Nilai-nilai empat pilar, seperti jiwa nasionalisme dan solidaritas, harus disosialisasikan pada masyarakat agar wujud dalam keseharian. Kita tidak ingin nilai-nilai ini hanya menjadi simbol yang tidak bermakna," katanya.

Oleh karena itu, kata Netty, penanaman nilai empat pilar harus dilakukan sejak dini pada anak-anak.

"Keluarga menjadi tempat utama dan pertama untuk menanamkan nilai-nilai empat pilar seperti nasionalisme, solidaritas dan persatuan. Jadi, kita perlu memberi dukungan pada keluarga agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Itulah sebabnya saya mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga dibahas di DPR RI agar negara hadir dalam memberi dukungan, perlindungan dan akses pada keluarga untuk menjadi keluarga yang kuat, berkualitas dan berketahanan," jelasnya.

Dalam pembukaan acara, Sekum DPD PKS Kab. Indramayu Hadi Hartono, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan acara tersebut dan meminta masyarakat Indramayu tetap menjaga persatuan, saling menghormati dan tidak melanggar hukum dalam proses memberi dukungan pada pason.

"Wong Dermayu harus fokus pada upaya perubahan kondisi sosial ekonomi Indramayu dengan berpegang pada nilai-nilai empat pilar,"



ujarnya.

Melihat antusiasme dan keseriusan masyarakat, Netty yakin bahwa sikon Indramayu tetap kondusif di masa pilkada ini.

"Insyallah masyarakat Indramayu tetap solid dan

guyub. Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memastikan keamanan dan ketertiban di sekitar lingkungan," tutup Netty.

## Berkunjung ke Dapil

# Alifudin Ajak Warga Perkuat Persatuan di Masa Pandemi

Peran kita sebagai warga negara, yaitu saling membantu dalam menghadapi Covid-19, karena sekarang ini dunia kesehatan kita sedang dapat ujian besar, pemerintah sudah mengeluarkan Protokol kesehatan dengan 3 M nya, dan kita harus mendukung agar penanganan Covid-19 semakin mudah

### H. ALIFUDIN, S.E.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

Kayong Utara (19/11) — Nilai Nilai persatuan bangsa yang terkandung dalam Pancasila semakin relevan dijalankan saat di masa pandemi Covid-19, Penguatan nilai persatuan dalam menekan perkembangannya wabah Covid-19.

Alifudin, Anggota DPR RI menjelaskan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara, Rabu (18/11/2020) malam.

Dalam sosialisasinya, Alifudin menjelaskan di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak yang bisa diambil sebagai

panduan dalam bermasyarakat untuk melawan covid-19.

"Peran kita sebagai warga negara, yaitu saling membantu dalam menghadapi Covid-19, karena sekarang ini dunia kesehatan kita sedang dapat ujian besar, pemerintah sudah mengeluarkan Protokol kesehatan dengan 3 M nya, dan kita harus mendukung agar penanganan Covid-19 semakin mudah," Ujarnya.

Alifudin juga menambahkan, banyaknya informasi terkait Covid-19 membuat kita harus pandai-pandai dalam menyaring informasi yang benar dan

akurat agar tidak terjadi permasalahan yang justru bertolak belakang dengan penanganan Covid-19.

"kita berharap dalam menghadapi pandemi ini, masyarakat semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan, sama-sama kita hadapi, jangan sampe malah bertikai yang disebabkan informasi-informasi hoax yang beredar," harapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati KKK, Effendi Ahmad, Kades Rantau Panjang, Hasanah serta warga desa.





Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

# KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI

[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)